

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengadilan Agama Banjarnegara

Tahun 2022



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan dan menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2022.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2022, yang meliputi Keadaan Perkara, Penyelesaian Perkara, Akreditasi Penjaminan Mutu, Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik Serta Pengawasan, sebagaimana telah dirumuskan dalam Program Kerja Tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan tersebut sepenuhnya mengacu pada arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan secara khusus bertujuan untuk mencapai dan merealisasi visi, misi dan rencana strategis Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2022 yang terinci dalam beberapa kebijakan dan kegiatan tahun 2022.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disusun berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2876/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama tahun 2022 dan bahan evaluasi perumusan rencana kerja tahun berikutnya sekaligus sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah dan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta pihak lain yang membutuhkan.

Dalam penyusunan laporan ini kami berusaha untuk menyajikan secara obyektif dan lengkap tentang Pengadilan Agama Banjarnegara dalam berbagai aspeknya, dengan harapan semoga laporan ini bisa menjadikan bahan kajian bagi Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan selanjutnya dapat meningkatkan kinerja kami dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Kami menyadari, walaupun laporan ini telah diusahakan dan disusun secara maksimal, namun sudah barang tentu masih banyak terdapat kekurangan, sehingga saran dan kritik demi perbaikan laporan ini sangat kami harapkan, terutama guna kesempurnaan pelaksanaan tugas kami ke depan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa kami berserah diri, dan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan Pelaksanaan Kegiatan ini diucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Banjarnegara, 10 Januari 2023

Ketua



Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.

NIP. 196708071993031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	KEADAAN PERKARA	9
	A. Keadaan Perkara	9
	- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	9
	- Keadaan Perkara Tingkat Banding	10
	- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	11
	- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	11
	B. Penyelesaian Perkara	11
	- Jumlah Sisa Perkara Putus	11
	- Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	12
	- Jumlah Perkara tidak Mengajukan Banding, Kasasi & PK	14
	- Jumlah Perkara Berhasil Mediasi	14
	- Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi	15
	C. Akreditasi Penjaminan Mutu	15
	- Posbakum	15
	- Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	17
	- Perkara Prodeo	17
BAB III	SUMBER DAYA MANUSIA	22
	A. Mutasi	25
	B. Promosi	27
	C. Pensiun	27
	D. Diklat	28
BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA/PRASARANA DAN TI	31
	A. Pengelolaan Keuangan	31
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	35
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi	39
	- Implementasi e-Court	39
	- Implementasi SIPP	41

BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	43
	A. Akreditasi Penjaminan Mutu	43
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	45
	C. Inovasi Pelayanan Publik	46
BAB VI	PENGAWASAN	61
	A. Internal	61
	B. Evaluasi	63
BAB VII	PENUTUP	65
	A. Kesimpulan	65
	B. Rekomendasi	66

Lampiran :

1. SK Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2. Matriks SOP Pengadilan Agama Banjarnegara
3. Dokumentasi Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di samping peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagai peradilan negara tertinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding.

Sebagai pelaksana salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang menjadi kompetensinya, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kompetensi absolut Pengadilan Agama meliputi perkara tertentu antara orang Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah. Sedangkan kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah meliputi wilayah kota dan kabupaten yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Pengadilan Agama Banjarnegara selama tahun 2022 menerapkan program kerja sebagai berikut :

1. Program Kerja Manajemen Peradilan
 - Peningkatan fungsi koordinasi, dengan sasaran terciptanya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi antara para pejabat di PA Banjarnegara dengan seluruh karyawan, terciptanya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi dengan instansi lain dan terciptanya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
 - Peningkatan kualitas mutu dan integritas pengadilan, dengan sasaran terlaksananya sistem penjaminan mutu dan terwujudnya zona integritas.
 - Peningkatan kualitas pengawasan, dengan sasaran terlaksananya pengawasan internal.

2. Program Kerja Teknis Yustisial
 - Penyelesaian Sisa Perkara, dengan sasaran mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Pencari Keadilan, dengan sasaran terlaksananya informasi publik melalui meja informasi, papan visual, TV Media, leaflet dan website, terlaksananya sistem antrian PTSP dan persidangan, terlaksananya panggilan delegasi/tabayun online, terlaksananya proses penanganan perkara secara cepat dan akurat, terlaksananya penyelesaian perkara secara tepat waktu, transparan dan akuntabel serta terlaksananya pelaksanaan putusan (eksekusi).
3. Program Kerja Administrasi Kepaniteraan
 - Peningkatan Pelaksanaan Administrasi Keperkaraan sesuai dengan Pola Bindalmin dengan sasaran terbentuknya sistem PTSP dalam proses pengelolaan pelayanan kepada masyarakat, terlaksananya Pelaksanaan Tugas Penerimaan Perkara pada PTSP, terlaksana Pelaksanaan Tugas Pengambilan Produk pada PTSP, terlaksananya Pelaksanaan Informasi dan Pengaduan pada PTSP, terlaksananya Pendaftaran Perkara melalui e-Court dan terlaksananya Penatausahaan Keuangan Perkara.
 - Peningkatan Pelaksanaan Tata Kearsipan dan Pelaporan dengan sasaran terlaksananya sistem kearsipan, terlaksananya Sistem Arsip Digital dan tertibnya pembuatan dan penyampaian laporan perkara tepat waktu.
 - Peningkatan Akses Masyarakat kepada Pengadilan dengan sasaran terbentuknya Pos Bantuan Hukum, terlaksananya Pembebasan Biaya Perkara Bagi Masyarakat tidak Mampu (Prodeo) dan terlaksananya Sidang di Luar Gedung.
 - Peningkatan Kualitas SDM Kepaniteraan dengan sasaran terciptanya Peningkatan Kualitas SDM Kepaniteraan
4. Program Kerja Kesekretariatan
 - Peningkatan Penataan Sistem Pengolahan Informasi Kepegawaian dengan sasaran tersedianya setiap jenis berkas kepegawaian pada masing-masing pegawai dalam bentuk dokumen elektronik, tertibnya seluruh susunan

dokumen fisik kepegawaian dan tersajinya data dan informasi kepegawaian sesuai aplikasi SIKEP dan ABS maupun dokumen fisik.

- Peningkatan Pelayanan Urusan Kepegawaian dengan sasaran terpenuhinya hak pegawai melalui penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB), terpenuhinya hak pegawai melalui pemberian cuti, terpenuhinya hak pegawai melalui pengusulan kenaikan pangkat, terpenuhinya hak pegawai melalui pemberian penghargaan Satya Lancana Sewindu dan Dwi Windu serta Satya Lancana Satya Karya, terpenuhinya hak pegawai melalui penyelenggaraan penilaian pegawai berupa penerbitan SKP dan PPK, terpenuhinya hak pegawai melalui penerbitan Karpeg, Karis/Karsu, BPJS dan Taspen, tertibnya administrasi kepegawaian dan terselenggaranya promosi dan mutasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Peningkatan Pembinaan Disiplin Pegawai dengan sasaran terlaksananya pembinaan disiplin pegawai melalui daftar hadir/pulang dan pengawasan sesuai SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008.
- Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pengadilan Melalui Pelaksanaan Diklat dengan sasaran terciptanya peningkatan kualitas pegawai melalui Diklat jabatan baik fungsional maupun struktural, terciptanya peningkatan kualitas pegawai melalui Diklat Teknis dan terciptanya kualitas Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional, Staf dan PPNPN melalui pengawasan dan pembinaan.
- Pengadaan Pegawai dengan sasaran terpenuhinya jumlah pegawai sesuai kebutuhan.
- Peningkatan Pengembangan Karir Pegawai dengan sasaran terciptanya pengembangan karir pegawai melalui ujian dinas, terlaksananya pengembangan karir pegawai melalui promosi dan mutasi jabatan dan terlaksananya pengembangan pegawai melalui tugas belajar dan izin belajar.
- Peningkatan Pelaksanaan Tata Persuratan dengan sasaran tata persuratan sesuai SK KMA No. 143/KMA/ SK/XII/2017 dan kearsipan dinamis.
- Peningkatan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara dengan sasaran terselenggaranya administrasi pengelolaan Barang Milik Negara dan terselenggaranya administrasi pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK).

- Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan sasaran terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
- Peningkatan Pemeliharaan Gedung dan Inventaris Perkantoran dengan sasaran terpeliharanya Gedung dan Inventaris Kantor.
- Peningkatan Pelaksanaan Fungsi Perpustakaan dengan sasaran terpeliharanya koleksi perpustakaan, terpeliharanya ruangan perpustakaan, tertibnya administrasi perpustakaan.
- Peningkatan Kebersihan dan Keamanan Lingkungan dengan sasaran terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan terciptanya keamanan kantor.
- Peningkatan pengelolaan fungsi kearsipan dengan sasaran tertibnya pengelolaan arsip perkantoran.
- Peningkatan pengelolaan fungsi keprotokolan dengan sasaran terlaksananya fungsi keprotokolan.
- Peningkatan pelaksanaan realisasi anggaran dengan sasaran terbentuknya tim pengelola keuangan, terlaksananya realisasi anggaran rutin, terlaksananya proses pengadaan belanja modal, terkendalinya proses pelaksanaan anggaran, terkendalinya proses pembukuan bendahara, tertibnya laporan realisasi anggaran dan tertatanya berkas dokumen keuangan dengan baik.
- Peningkatan administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan sasaran tertibnya pengelolaan PNBP.
- Peningkatan Kualitas Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dengan sasaran tersusunnya RKAKL, terlaksananya Revisi Anggaran dan Tersusunnya Rencana Penarikan Sebagai Dasar Pelaksanaan Anggaran.
- Penyajian Perencanaan Program dan Rencana Pengadaan dengan sasaran Penyusunan Rencana Program Kegiatan dan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan.
- Peningkatan fungsi monitoring anggaran dan kinerja dengan sasaran terlaksananya monitoring pelaksanaan anggaran dan terlaksananya monitoring capaian kinerja.

- Peningkatan pelaksanaan penyusunan laporan tahunan dan laporan akuntabilitas dengan sasaran terlaksananya penyusunan laporan tahunan dan terlaksananya penyusunan laporan kinerja.

B. Profil Pengadilan Agama Banjarnegara

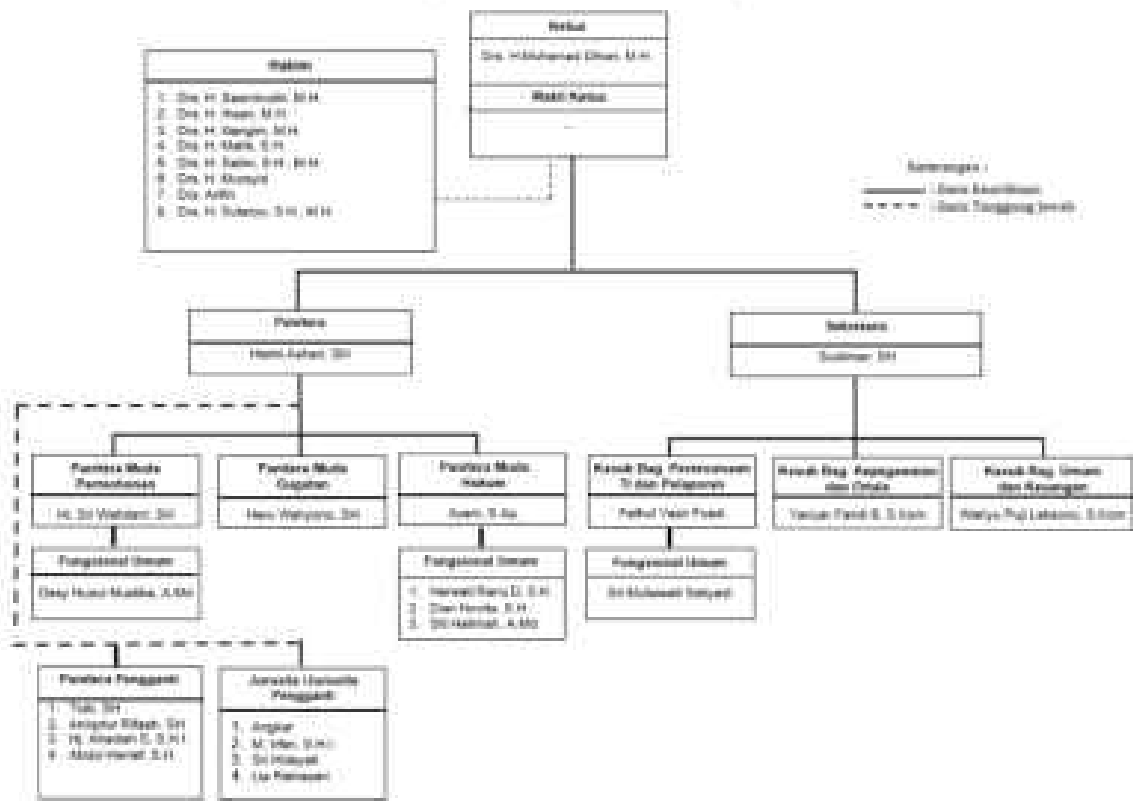
Pengadilan Agama Banjarnegara berkedudukan di Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Secara administratif Kabupaten Banjarnegara memiliki wilayah seluas 1070 km² atau 3,10% dari luas wilayah Jawa Tengah. Kabupaten Banjarnegara berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Batang di utara, Kabupaten Wonosobo di timur, Kabupaten Kebumen di selatan serta Kabupaten Banyumas dan Purbalingga di sebelah barat. Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan dan 278 desa/kelurahan dengan penduduk sejumlah 923.192 jiwa.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara yang terdiri 20 Kecamatan dengan rincian terdiri 273 desa dan 5 kelurahan. Adapun kecamatan-kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Wanadadi, Kecamatan Susukan, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Rakit, Kecamatan Purworejo Klampok, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Pandandarum, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Madukara, Kecamatan Karangobar, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Bawang, Kecamatan Batur, Kecamatan Banjarnegara.

Sampai dengan berakhirnya tahun 2022, sumber daya manusia Pengadilan Agama Banjarnegara berjumlah 42 orang dengan rincian terdiri dari 20 orang tenaga teknis (8 orang Hakim, 1 orang Panitera, 3 orang Panitera Muda, 4 orang Panitera Pengganti, 2 orang Jusrita dan 2 orang Jusrita Pengganti), 14 orang tenaga Non Teknis (1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Sub Bagian, 2 orang staf, 3 orang CPNS dan 8 orang Pegawai Non PNS).

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Banjarnegara sampai dengan berakhirnya tahun 2022 adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
 (Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015)



C. Visi, Misi dan Rencana Strategis

Sebagai sebuah lembaga, Pengadilan Agama Banjarnegara mempunyai visi dan misi sebagai landasan dalam melaksanakan tugas. Visi Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA adalah merupakan manifestasi dari Visi Mahkamah Agung RI serta merupakan perpanjangan dari Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang akan menjadi pandangan dan penunjuk arah serta sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.

Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan :

VISI :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara yang Agung.”

MISI :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Menyelenggarakan Peradilan yang Bersih dan Bebas dari Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
4. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.

Untuk mengkonkritkan visi dan misi tersebut bukan pekerjaan mudah, diperlukan suatu penelaahan mendalam atas segala permasalahan yang ada serta penetapan rencana dan strategi yang tepat dan komprehensif diberbagai lini disektor kebijakan, adapun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Banjarnegara sebagaimana di atas, telah dirumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2022, sebagai berikut : :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, dengan indikator:
 - Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan
 - Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu
 - Persentase Penurunan Sisa Perkara
 - Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK
 - Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan indikator:
 - Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu
 - Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi
 - Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu
 - Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari sejak Putus

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, dengan indikator:
 - Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
 - Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
 - Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
 - Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan, dengan indikator:
 - Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Pelaksanaan dan pelaporan atas capaian indikator-indikator Renstra tersebut disajikan dalam laporan tersendiri dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2022 yang terpisah dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara

▪ Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Banjarnegara sepanjang tahun 2022 mengelola perkara sebanyak 3.563 perkara yang terdiri dari sisa perkara tahun 2021 sebanyak 145 perkara dan 3.418 perkara yang diterima di tahun 2022. Dari 3.563 perkara tersebut, berhasil diputus sebanyak 3.385 perkara sehingga sisa perkara tahun 2022 sebanyak 178 perkara. Dengan demikian tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2022 sebesar 95,00%. Secara rinci berikut penanganan perkara pada Pengadilan Agama Banjarnegara berdasarkan jenis perkara di tahun 2022 :

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2021	Terima Tahun 2022	Putus Tahun 2022	Sisa Tahun 2022
1	Izin Poligami	1	6	6	1
2	Pembatalan Perkawinan	-	2	2	-
3	Cerai Talak	43	643	654	32
4	Cerai Gugat	97	1.990	1.955	132
5	Harta Bersama	2	2	4	-
6	Penguasaan Anak	-	3	3	-
7	Perwalian	-	11	11	-
8	Asal Usul Anak	-	10	10	-
9	Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah	1	26	18	9
10	Dispensasi Kawin	-	681	680	1
11	Wali Adhol	-	5	4	1
12	Kewarisan	-	2	1	1
13	Lain-Lain	1	18	18	1
14	P3HP/Penetapan Ahli Waris	-	19	19	-
Jumlah total		145	3.418	3.385	178

Dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, maka Pengadilan Agama Banjarnegara juga telah menerima pendaftaran secara elektronik atau melalui e-Court. Adapun perkara yang diterima melalui e-Court sepanjang tahun 2022 sejumlah **978 perkara** atau sebesar 28,61% dari

keseluruhan pendaftaran perkara tahun 2022, dengan rincian jenis perkara sebagai berikut:

No	Klasifikasi Perkara	Jumlah
1	Cerai Gugat	706
2	Cerai Talak	258
3	Harta Bersama	1
4	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	4
5	Penguasaan Anak	2
6	Dispensasi Kawin	2
7	P3HP/Penetapan Ahli Waris	1
8	Kewarisan	1
9	Lain-Lain	3
	Jumlah	978

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian maupun poligami harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin perceraian maupun ijin poligami dari atasannya. Pada akhir tahun 2022 terdapat sisa sejumlah 9 perkara di Pengadilan Agama Banjarnegara yang salah satu pihaknya atau kedua-duanya PNS sebanyak dengan rincian perkara sebagai berikut:

No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2021	Terima Tahun 2022	Putus Tahun 2022	Sisa Tahun 2022
1	Izin Poligami	-	-	-	-
2	Cerai Talak	8	11	19	-
3	Cerai Gugat	7	37	35	9
	Jumlah total	15	48	54	9

▪ Perkara Tingkat Pertama Yang Diajukan Banding

Perkara Pengadilan Agama Banjarnegara yang dimohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tahun 2022 sebanyak 6 perkara, dengan rincian klasifikasi perkara sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Jumlah Banding
1.	Cerai Talak	1
2.	Cerai Gugat	4
3.	Harta Bersama	1
	Jumlah	6

- **Perkara Tingkat Pertama Yang Diajukan Kasasi**

Perkara Pengadilan Agama Banjarnegara yang dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2022 sebanyak 1 perkara, dengan rincian klasifikasi perkara sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Jumlah Kasasi
1.	Cerai Gugat	1
	Jumlah	1

- **Perkara Tingkat Pertama Yang Diajukan Peninjauan Kembali**

Pada tahun 2022 tidak terdapat pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan di Pengadilan Agama Banjarnegara.

B. Penyelesaian Perkara

- **Jumlah Sisa Perkara Putus**

Sisa perkara yang diselesaikan merupakan sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan pada tahun berjalan. Sisa perkara tahun 2021 yang harus diselesaikan tahun 2022 adalah sebanyak 145 perkara dan dapat terselesaikan seluruhnya pada tahun 2022. Adapun waktu penyelesaian perkara tahun 2022 tersebut beserta rincian jenis putusan yang dijatuhkan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Putusan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
1	Dicabut	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6
2	Dikabulkan	88	15	18	14	2	-	-	-	-	-	-	-	137
3	Ditolak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tidak Diterima	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Gugur	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Dicoret dari Pendaftaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	93	15	19	16	2	-	-	-	-	-	-	-	145

▪ **Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu**

Perkara putus tepat waktu adalah perkara yang diterima tahun 2022 dan diselesaikan juga di tahun 2022. Dari 3.418 perkara baru yang diterima tahun 2022, terdapat 3.240 perkara yang diputus tepat waktu atau sebesar 94,78%. Berikut adalah rincian waktu dan jenis putusannya:

No	Jenis Putusan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
1	Dicabut	23	11	21	22	19	36	24	15	20	17	11	18	237
2	Dikabulkan	145	204	262	179	197	344	275	253	289	296	258	252	2954
3	Ditolak	-	-	4	2	-	2	-	-	1	-	1	2	12
4	Tidak Diterima	-	2	0	3	1	2	1	3	3	2	1	1	19
5	Gugur	1	1	-	1	3	2	2	3	-	-	-	2	15
6	Dicoret dari Pendaftaran	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3
	Jumlah	169	218	287	207	220	387	302	275	313	316	271	275	3240

Apabila sisa perkara tahun 2021 (145 perkara) beserta perkara baru yang diterima tahun 2022 (3.418 perkara) digabungkan sebagai menjadi beban perkara yang harus diselesaikan tahun 2022 (3.563 perkara) dan total perkara putus tahun 2022 adalah sebanyak 3.240 perkara maka persentase penyelesaian perkara adalah sebesar 95,00%. Berikut adalah rincian waktu dan jenis putusannya:

No	Jenis Putusan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
1	Dicabut	28	11	21	23	19	36	24	15	20	17	11	18	243
2	Dikabulkan	233	219	280	193	199	344	275	253	289	296	258	252	3.091
3	Ditolak	-	-	4	2	-	2	-	-	1	-	1	2	12
4	Tidak Diterima	-	2	1	3	1	2	1	3	3	2	1	1	20
5	Gugur	1	1	-	2	3	2	2	3	-	-	-	2	16
6	Dicoret dari Pendaftaran	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3
	Jumlah	262	233	306	223	222	387	302	275	313	316	271	275	3.385

Mayoritas putusan yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Banjarnegara adalah putus dikabulkan dengan persentase sebesar 91,31%, diikuti dengan putus dicabut sebesar 7,18%. Dilihat dari data perkara yang mengajukan banding, kasasi dan Peninjauan Kembali yang hanya terdapat 7 perkara (6 perkara Banding dan 1 perkara Kasasi) dari 3385 putusan, maka secara umum para pencari keadilan sangat puas atas putusan Pengadilan Agama Banjarnegara dimana hanya 0,21% yang tidak puas dan mengajukan upaya hukum lanjutan.

Waktu atau tempo yang diperlukan dari perkara untuk disidang sampai dengan putus dapat dilihat pada tabel berikut, dimana secara umum mayoritas perkara di Pengadilan Agama Banjarnegara putus dalam waktu kurang dari 30 hari:

Perkara Tahun 2022	Putus < 30 hari (1 bulan)	Putus 31-60 hari (2 bulan)	Putus 61-90 hari (3 bulan)	Putus 91-120 hari (4 bulan)	Putus 121-150 hari (5 bulan)	Putus > 5 bulan
3385	2736	245	70	42	285	7

Apabila dipersentasekan, 80,83% perkara diselesaikan dalam tempo 1-30 hari (1 bulan), 7,24% perkara diselesaikan dalam tempo 31-60 hari (2 bulan), 2,07% perkara diselesaikan dalam tempo 61-90 hari (3 bulan), 1,24% perkara diselesaikan dalam tempo 91-120 hari (4 bulan), 8,42% perkara diselesaikan dalam tempo 121-150 hari (5 bulan) dan 0,21% perkara diselesaikan dalam tempo lebih dari 5 bulan.

▪ **Jumlah Perkara tidak Mengajukan Banding, Kasasi dan PK**

Dilihat dari perkara yang diputus pada tahun 2022 sejumlah 3385 perkara, terdapat 6 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, 1 perkara mengajukan upaya hukum Kasasi dan tidak terdapat pendaftaran Peninjauan Kembali. Dengan demikian total terdapat 3378 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan sehingga tingkat kepuasan penyelesaian perkara sebesar $3378 / 3385 \times 100\% = 99,79\%$.

Lebih detail perkara yang mengajukan upaya hukum lanjutan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nomor Perkara	Upaya Hukum	Tanggal Pendaftaran Tk. Pertama	Tanggal Putus Perkara Tk. Pertama	Nomor Perkara Upaya Hukum
1.	2302/Pdt.G/2021/PA.Ba	Banding	10/11/2021	25/02/2022	105/Pdt.G/2022/PTA.Smg
2.	2341/Pdt.G/2021/PA.Ba	Banding	15/11/2021	19/04/2022	184/Pdt.G/2022/PTA.Smg
3.	1021/Pdt.G/2022/PA.Ba	Banding	17/05/2022	04/07/2022	275/Pdt.G/2022/PTA.Smg
4.	1053/Pdt.G/2022/PA.Ba	Banding	19/05/2022	12/08/2022	317/Pdt.G/2022/PTA.Smg
5.	1261/Pdt.G/2022/PA.Ba	Banding	09/06/2022	08/09/2022	352/Pdt.G/2022/PTA.Smg
6.	1555/Pdt.G/2022/PA.Ba	Banding	15/07/2022	10/10/2022	389/Pdt.G/2022/PTA.Smg
7.	1053/Pdt.G/2022/PA.Ba	Kasasi	19/05/2022	17/10/2022	-

▪ **Jumlah Perkara Berhasil Mediasi**

Selama tahun 2022 perkara yang menempuh mediasi sebanyak 279 perkara, yang semuanya melalui mediator Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara. Dari perkara tersebut terdapat 8 perkara yang berhasil dimediasi dan 230 perkara tidak berhasil dimediasi. Dengan demikian tingkat keberhasilan mediasi Pengadilan Agama Banjarnegara sebesar $8 / 230 \times 100\% = 3,48\%$

No	Bulan	Jumlah perkara yang di Mediasi	Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi
			Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal	
1	Januari	21	-	20	-	-
2	Pebruari	23	-	24	-	-
3	Maret	30	3	20	-	-
4	April	25	-	27	-	-
5	Mei	26	-	24	-	-
6	Juni	11	-	14	-	-
7	Juli	31	-	28	-	-
8	Agustus	26	1	21	--	-
9	September	24	-	28	-	-
10	Oktober	22	2	13	-	-
11	Nopember	17	1	4	-	-
12	Desember	23	1	7	-	-
Jumlah		279	8	230	-	41

▪ **Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi**

Pengadilan Agama Banjarnegara pada tahun 2022 tidak ada perkara anak yang berhasil melalui diversi karena diversi merupakan kewenangan yang berhubungan dengan proses peradilan pidana.

C. Akreditasi Penjaminan Mutu

▪ **Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum**

Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan pada Pasal 4 bahwa layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan terdiri dari :

- Layanan Pembebasan Biaya Perkara
- Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan
- Penyediaan Posbakum Pengadilan

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Banjarnegara mendapatkan alokasi anggaran Pos Bantuan Hukum dengan nilai pagu sebesar Rp. 60.180.000 (*enam puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah*). Melalui mekanisme pengadaan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, terpilih Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banjarnegara yang diketuai oleh Ahmad Rahardjo, S.H.

Penyelenggaraan Posbakum pada Pengadilan Agama Banjarnegara dilaksanakan mulai 11 Januari 2022 s/d 30 November 2022 sesuai dengan SPK Nomor W11-A5/209/PL.08/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60.180.000 (*enam puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah*) dengan pembayaran dilaksanakan melalui 11 (sebelas) termin pembayaran.

Layanan Pos Bantuan Hukum yang dilaksanakan dengan target jam layanan sebesar 1003 Jam Layanan dan dapat terlaksana melebihi target yaitu sebesar 1421 Jam Layanan. Untuk orang yang dilayani ditargetkan melayani 1023 orang yang dilayani dan pada realisasinya tercapai melebihi target yaitu sebanyak 1167 orang yang dilayani. Adapun rincian realisasi anggaran Pos Bantuan Hukum seperti tertampil pada matriks berikut:

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Bayar	Target Jam Layanan	Jam Layanan Terlaksana	Target Orang Dilayani	Jumlah Orang yang dilayani
1.	08-02-2022	Rp. 4.212.600	75 JL	80 JL	77 orang	49 orang
2.	01-03-2022	Rp. 5.416.200	95 JL	119 JL	99 orang	119 orang
3.	01-04-2022	Rp. 5.416.200	110 JL	161 JL	99 orang	180 orang
4.	09-05-2022	Rp. 5.416.200	100 JL	121 JL	99 orang	105 orang
5.	02-06-2022	Rp. 4.212.600	75 JL	83 JL	77 orang	129 orang
6.	01-07-2022	Rp. 6.018.000	105 JL	140 JL	110 orang	130 orang
7.	01-08-2022	Rp. 6.018.000	105 JL	156 JL	110 orang	118 orang
8.	01-09-2022	Rp. 6.018.000	110 JL	147 JL	110 orang	109 orang
9.	01-10-2022	Rp. 6.018.000	110 JL	127 JL	110 orang	113 orang
10.	01-11-2022	Rp. 6.018.000	105 JL	150 JL	110 orang	82 orang
11.	01-12-2022	Rp. 5.416.200	13 JL	137 JL	99 orang	82 orang
	Jumlah	Rp. 60.180.000	1003 JL	1421 JL	1023 orang	1167 orang

▪ **Penyelenggaraan Sidang Keliling**

Pengadilan Agama Banjarnegara pada tahun 2022 mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 21.800.000 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga	Jumlah
1.	Biaya Kebersihan	20	KEG	Rp. 145.000	Rp. 2.900.000
2.	Persiapan dan Perlengkapan Sidang	1	PKT	Rp. 900.000	Rp. 900.000
3.	Biaya Transport dan Uang Harian	120	OK	Rp. 150.000	Rp. 18.000.000
	Jumlah				Rp. 21.800.000

Pelaksanaan sidang keliling dilaksanakan di kecamatan Wanayasa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor W11-A5/866/HM.01/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 dan surat persetujuan dari Camat Wanayasa Nomor 450/282/Kec.Wny/2022 tanggal 31 Maret 2022.

Sidang keliling dilaksanakan sebanyak 20 kali kegiatan setiap hari Jumat mulai tanggal 01 April 2022 dan berakhir pada tanggal 09 September 2022. Perkara yang disidangkan sebanyak 147 perkara gugatan dan permohonan dengan susunan Majelis Hakim dipimpin oleh Drs. Syahrial, S.H. sebagai Ketua Majelis dan beranggotakan Drs. H. Mahli, S.H. dan Dra. Hj. Siti Syamsiyah serta dibantu Toib, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

▪ **Pembebasan Biaya Perkara**

Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014, Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan, dan pada tahun 2022 Pengadilan Agama Banjarnegara mendapat pagu anggaran pembebasan biaya perkara sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga	Jumlah
1.	Biaya Pemberitahuan Putusan	100	PKR	Rp. 15.000	Rp. 1.500.000
2.	Meterai	100	PKR	Rp. 10.000	Rp. 1.000.000
3.	Biaya Proses	100	PKR	Rp. 75.000	Rp. 7.500.000
4.	Biaya Panggilan	100	PKR	Rp. 400.000	Rp. 40.000.000
	Jumlah				Rp. 50.000.000

Dari total pagu anggaran tersebut, dari target 100 perkara terealisasi untuk 109 perkara dengan rincian pengeluaran sebagai berikut:

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Putus
1	430/Pdt.G/2022/PA.Ba	16/02/2022	09/03/2022
2	448/Pdt.G/2022/PA.Ba	17/02/2022	07/07/2022
3	457/Pdt.G/2022/PA.Ba	18/02/2022	05/07/2022
4	494/Pdt.G/2022/PA.Ba	24/02/2022	15/03/2022
5	509/Pdt.G/2022/PA.Ba	01/03/2022	16/03/2022
6	525/Pdt.G/2022/PA.Ba	02/03/2022	11/07/2022
7	578/Pdt.G/2022/PA.Ba	09/03/2022	07/04/2022
8	612/Pdt.G/2022/PA.Ba	14/03/2022	31/03/2022
9	627/Pdt.G/2022/PA.Ba	15/03/2022	07/04/2022
10	623/Pdt.G/2022/PA.Ba	15/03/2022	31/03/2022
11	647/Pdt.G/2022/PA.Ba	17/03/2022	25/07/2022
12	670/Pdt.G/2022/PA.Ba	21/03/2022	06/04/2022
13	683/Pdt.G/2022/PA.Ba	22/03/2022	02/08/2022
14	707/Pdt.G/2022/PA.Ba	25/03/2022	20/04/2022
15	731/Pdt.G/2022/PA.Ba	29/03/2022	14/04/2022
16	729/Pdt.G/2022/PA.Ba	29/03/2022	14/04/2022
17	735/Pdt.G/2022/PA.Ba	30/03/2022	14/04/2022
18	740/Pdt.G/2022/PA.Ba	31/03/2022	11/08/2022
19	752/Pdt.G/2022/PA.Ba	01/04/2022	22/04/2022
20	755/Pdt.G/2022/PA.Ba	04/04/2022	21/04/2022
21	760/Pdt.G/2022/PA.Ba	05/04/2022	26/04/2022
22	784/Pdt.G/2022/PA.Ba	11/04/2022	22/08/2022
23	823/Pdt.G/2022/PA.Ba	19/04/2022	20/05/2022
24	842/Pdt.G/2022/PA.Ba	21/04/2022	24/05/2022
25	871/Pdt.G/2022/PA.Ba	26/04/2022	05/09/2022
26	885/Pdt.G/2022/PA.Ba	28/04/2022	19/09/2022
27	903/Pdt.G/2022/PA.Ba	09/05/2022	18/05/2022
28	972/Pdt.G/2022/PA.Ba	11/05/2022	06/06/2022

29	992/Pdt.G/2022/PA.Ba	13/05/2022	20/05/2022
30	994/Pdt.G/2022/PA.Ba	13/05/2022	27/05/2022
31	1023/Pdt.G/2022/PA.Ba	17/05/2022	26/09/2022
32	1106/Pdt.G/2022/PA.Ba	24/05/2022	04/10/2022
33	1117/Pdt.G/2022/PA.Ba	25/05/2022	04/06/2022
34	1119/Pdt.G/2022/PA.Ba	25/05/2022	04/10/2022
35	1124/Pdt.G/2022/PA.Ba	25/05/2022	04/10/2022
36	1146/Pdt.G/2022/PA.Ba	30/05/2022	27/06/2022
37	1164/Pdt.G/2022/PA.Ba	31/05/2022	11/10/2022
38	1182/Pdt.G/2022/PA.Ba	02/06/2022	11/10/2022
39	1190/Pdt.G/2022/PA.Ba	02/06/2022	22/06/2022
40	1195/Pdt.G/2022/PA.Ba	02/06/2022	10/10/2022
41	1200/Pdt.G/2022/PA.Ba	02/06/2022	15/06/2022
42	1250/Pdt.G/2022/PA.Ba	07/06/2022	29/06/2022
43	1363/Pdt.G/2022/PA.Ba	21/06/2022	07/07/2022
44	1366/Pdt.G/2022/PA.Ba	21/06/2022	07/07/2022
45	1395/Pdt.G/2022/PA.Ba	23/06/2022	13/07/2022
46	1434/Pdt.G/2022/PA.Ba	29/06/2022	08/11/2022
47	1444/Pdt.G/2022/PA.Ba	30/06/2022	19/07/2022
48	1446/Pdt.G/2022/PA.Ba	30/06/2022	12/07/2022
49	1490/Pdt.G/2022/PA.Ba	06/07/2022	17/11/2022
50	1550/Pdt.G/2022/PA.Ba	14/07/2022	04/08/2022
51	1558/Pdt.G/2022/PA.Ba	15/07/2022	22/11/2022
52	1589/Pdt.G/2022/PA.Ba	19/07/2022	03/08/2022
53	1597/Pdt.G/2022/PA.Ba	21/07/2022	28/11/2022
54	433/Pdt.P/2022/PA.Ba	25/07/2022	15/08/2022
55	1644/Pdt.G/2022/PA.Ba	27/07/2022	05/12/2022
56	1645/Pdt.G/2022/PA.Ba	27/07/2022	24/08/2022
57	1691/Pdt.G/2022/PA.Ba	04/08/2022	22/08/2022
58	1696/Pdt.G/2022/PA.Ba	04/08/2022	12/12/2022
59	1702/Pdt.G/2022/PA.Ba	05/08/2022	15/12/2022

60	1710/Pdt.G/2022/PA.Ba	08/08/2022	25/08/2022
61	1740/Pdt.G/2022/PA.Ba	09/08/2022	19/12/2022
62	1771/Pdt.G/2022/PA.Ba	15/08/2022	20/12/2022
63	1784/Pdt.G/2022/PA.Ba	16/08/2022	02/09/2022
64	1798/Pdt.G/2022/PA.Ba	18/08/2022	05/09/2022
65	1815/Pdt.G/2022/PA.Ba	22/08/2022	27/09/2022
66	1825/Pdt.G/2022/PA.Ba	23/08/2022	03/01/2022
67	1856/Pdt.G/2022/PA.Ba	25/08/2022	06/09/2022
68	1857/Pdt.G/2022/PA.Ba	25/08/2022	03/01/2022
69	1859/Pdt.G/2022/PA.Ba	26/08/2022	13/09/2022
70	1865/Pdt.G/2022/PA.Ba	29/08/2022	<i>belum putus</i>
71	1911/Pdt.G/2022/PA.Ba	02/09/2022	20/09/2022
72	1920/Pdt.G/2022/PA.Ba	05/09/2022	03/10/2022
73	1934/Pdt.G/2022/PA.Ba	06/09/2022	27/09/2022
74	1941/Pdt.G/2022/PA.Ba	06/09/2022	15/09/2022
75	1952/Pdt.G/2022/PA.Ba	07/09/2022	15/09/2022
76	1967/Pdt.G/2022/PA.Ba	08/09/2022	<i>belum putus</i>
77	1970/Pdt.G/2022/PA.Ba	08/09/2022	26/09/2022
78	1971/Pdt.G/2022/PA.Ba	08/09/2022	26/09/2022
79	1974/Pdt.G/2022/PA.Ba	08/09/2022	26/09/2022
80	1979/Pdt.G/2022/PA.Ba	09/09/2022	29/09/2022
81	2007/Pdt.G/2022/PA.Ba	14/09/2022	<i>belum putus</i>
82	2012/Pdt.G/2022/PA.Ba	14/09/2022	04/10/2022
83	2013/Pdt.G/2022/PA.Ba	14/09/2022	<i>belum putus</i>
84	2014/Pdt.G/2022/PA.Ba	15/09/2022	04/10/2022
85	2078/Pdt.G/2022/PA.Ba	21/09/2022	<i>belum putus</i>
86	2140/Pdt.G/2022/PA.Ba	30/09/2022	24/10/2022
87	2141/Pdt.G/2022/PA.Ba	30/09/2022	24/10/2022
88	2154/Pdt.G/2022/PA.Ba	03/10/2022	20/10/2022
89	2166/Pdt.G/2022/PA.Ba	04/10/2022	<i>belum putus</i>
90	2167/Pdt.G/2022/PA.Ba	05/10/2022	<i>belum putus</i>

91	2198/Pdt.G/2022/PA.Ba	10/10/2022	09/11/2022
92	2242/Pdt.G/2022/PA.Ba	18/10/2022	03/11/2022
93	2246/Pdt.G/2022/PA.Ba	18/10/2022	02/11/2022
94	2256/Pdt.G/2022/PA.Ba	19/10/2022	03/11/2022
95	2322/Pdt.G/2022/PA.Ba	31/10/2022	31/10/2022
96	2324/Pdt.G/2022/PA.Ba	31/10/2022	15/12/2022
97	2331/Pdt.G/2022/PA.Ba	01/11/2022	16/11/2022
98	2397/Pdt.G/2022/PA.Ba	14/11/2022	01/12/2022
99	2405/Pdt.G/2022/PA.Ba	15/11/2022	<i>belum putus</i>
100	2411/Pdt.G/2022/PA.Ba	15/11/2022	<i>belum putus</i>
101	736/Pdt.P/2022/PA.Ba	08/12/2022	29/12/2022
102	738/Pdt.P/2022/PA.Ba	09/12/2022	<i>belum putus</i>
103	739/Pdt.P/2022/PA.Ba	09/12/2022	<i>belum putus</i>
104	746/Pdt.P/2022/PA.Ba	12/12/2022	<i>belum putus</i>
105	748/Pdt.P/2022/PA.Ba	13/12/2022	<i>belum putus</i>
106	751/Pdt.P/2022/PA.Ba	14/12/2022	<i>belum putus</i>
107	753/Pdt.P/2022/PA.Ba	14/12/2022	<i>belum putus</i>
108	755/Pdt.P/2022/PA.Ba	14/12/2022	<i>belum putus</i>
109	756/Pdt.P/2022/PA.Ba	14/12/2022	<i>belum putus</i>

Dari 109 perkara tersebut, terdapat 17 perkara yang belum putus dimana sebanyak 9 (sembilan) perkara diantaranya merupakan perkara dengan Tergugat tidak diketahui alamatnya sehingga membutuhkan bantuan media massa untuk melaksanakan panggilan sidang dan sidangnya dijadwalkan 4 bulan setelah pendaftaran. Adapun 8 (delapan) perkara yang lain adalah perkara itsbat nikah yang baru didaftarkan pada pertengahan bulan Desember 2022.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Banjarnegara sampai dengan Desember 2022 seluruhnya berjumlah 37 orang, dengan rincian Pegawai Negeri Sipil 29 orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebanyak 8 orang.

Dalam rangka untuk meningkatkan ketrampilan, kinerja dan profesionalisme tenaga teknis peradilan dibutuhkan sumber daya yang berkualitas, oleh karena itu Pengadilan Agama Banjarnegara memberikan kesempatan kepada para pejabat teknis maupun pejabat struktural untuk mengikuti berbagai pelatihan dan pembinaan. Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan adalah dengan cara mengadakan sosialisasi mengenai pedoman dan petunjuk teknis yang menyangkut dengan bidang pokok peradilan agama.

Untuk peningkatan wawasan keilmuan dalam rangka menunjang tugas tugas pokok pada satuan kerja masing-masing aparat peradilan secara umum telah diberikan kesempatan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi mulai S1, S2 sampai dengan S3, sedangkan pembinaan karier dilaksanakan sesuai dengan senioritas kepangkatan dan kemampuan setiap aparatur. Pelaksanaan kegiatan pembinaan tersebut di atas dapat digambarkan bahwa pembinaan sumber daya manusia (SDM) terhadap tenaga teknis yustisial yang terdiri dari hakim dan panitera serta jurusita dengan mengikuti pendalaman materi hukum formil dan materiil serta pemahaman terhadap hukum ekonomi syariah, sedangkan bagi pejabat/pegawai non teknis diberikan pelatihan dan bimbingan teknis administrasi sesuai bidang tugas pokok masing-masing.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas kemampuan teknis yudisial aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2022 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya telah diadakan diskusi-diskusi yang terjadwal yang diikuti oleh Hakim, Pejabat dan Pegawai Kepaniteraan, serta kegiatan berupa implementasi SIPP dalam rangka merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung berupa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan program lainnya secara maksimal.

Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Agama Banjarnegara pada posisi ketika laporan ini dibuat dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.	196708071993031004	Ketua
2.	Drs. Mahli, S.H.	195810051983031007	Hakim
3.	Drs. H. Nangim, M.H.	195907161987031002	Hakim
4.	Drs. H. Sasmiruddin, M.H.	196210101992031008	Hakim
5.	Drs. H. Ihsan, M.H.	196605291994021001	Hakim
6.	Drs. H. Salim, S.H., M.H.	196510041994031004	Hakim
7.	Drs. H.M. Mursyid	196601171991031001	Hakim
8.	Drs. Arifin	196604111993031004	Hakim
9.	Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.	196201251994031003	Hakim
10.	Sudiman, S.H.	197010071994031002	Sekretaris
11.	Helmi Ashari, S.H.	196806051992031004	Panitera
12.	Hj. Sri Wahdani, S.H.	196910051992032005	Panmud Permohonan
13.	Heru Wahyono, S.H.	196504161991031005	Panmud Gugatan
14.	Ayani, S.Ag	197207022002122001	Panmud Hukum
15.	Wahyu Puji Leksono, S.Kom	198112032009121003	Kasub Umum dan Keuangan
16.	Fathul Yasir Fuadi, S.Kom, S.H.	198706222011011005	Kasub Perencanaan, TI dan Pelaporan
17.	Yanuar Fandi Bahtiar, S.Kom.	198901102015031002	Kasub Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
18.	Toib, S.H.	196704271989031002	Panitera Pengganti
19.	Aniqotur Rifa'ah, S.H.	198806022011012013	Panitera Pengganti
20.	Ahadiah Shofiana, S.H.I.	198111012009042006	Panitera Pengganti
21.	Abdul Hanief, SH	198104022009121003	Panitera Pengganti
22.	Angkat	196604092014081001	Jurusita
23.	Muhammad Irfan, S.H.I.	198703302014031003	Jurusita
24.	Sri Hidayati	196504222014082002	Jurusita Pengganti
25.	Lia Ratnasari, S.E.	199308052019032013	Jurusita Pengganti
26.	Herwati Ranu Dwiyekti, S.H.	199612262020122012	Analisis Perkara Peradilan
27.	Desy Nuzul Mustika, A.Md.	199212162020122006	Pengadministrasi Registrasi Perkara
28.	Sri Muliawati Setiyadi, S.Sos.	199303062022032015	CPNS
29.	Dian Novita, S.H.	199811212022032005	CPNS

30.	Siti Halimah, A.Md	199607312022032011	CPNS
31.	Topo Adi	-	PPNPN (Pramubakti)
32.	M. Hudan Wicaksono	-	PPNPN (Pengemudi)
33.	Surrachman, A.Md.	-	PPNPN (Pramubakti)
34.	Dwi Urip Diah	-	PPNPN (Pramubakti)
35.	Siti Wakhidah Hajar, S.Kom	-	PPNPN (Pramubakti)
36.	Sri Widianti	-	PPNPN (Pramubakti)
37.	Berlin, S.E.	-	PPNPN (Pramubakti)
38.	Rony Romansyah	-	PPNPN (Pramubakti)

Dengan demikian rekapitulasi sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Banjarnegara baik itu tenaga teknis maupun non teknis ditambah dengan tenaga Pramubakti adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah
1.	Ketua	1 orang
2.	Wakil Ketua	- orang
3.	Hakim	8 orang
4.	Panitera	1 orang
5.	Panitera Muda	3 orang
6.	Panitera Pengganti	4 orang
7.	Jurusita	2 orang
8.	Jurusita Pengganti	2 orang
9.	Sekretaris	1 orang
10.	Kasubbag	3 orang
11.	Analisis Perkara Peradilan	1 orang
12.	Pengadministrasi Registrasi Perkara	1 orang
13.	CPNS	3 orang
14.	PPNPN	8 orang
	Jumlah	38 orang

A. Mutasi

Sepanjang tahun 2022 di Pengadilan Agama Banjarnegara telah dilaksanakan mutasi pegawai baik berupa mutasi pegawai masuk dari luar Pengadilan Agama Banjarnegara maupun keluar dari Pengadilan Agama Banjarnegara. Selain itu terdapat juga mutasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala. Adapun rincian mutasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Mutasi Masuk Promosi, sebanyak 5 (lima) orang pegawai:

No	Nama	Sebelum	Sesudah	TMT
1.	Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.	Hakim PA Batang Kelas IB	Hakim PA Banjarnegara Kelas IA	02-02-2022
2.	Yanuar Fandi Bahtiar, S.Kom	Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan PA Banyumas Kelas IB	Kasubbag Kepegawaian & Ortala PA Banjarnegara Kelas IA	09-03-2022
3.	Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.	Wakil Ketua PA Semarang Kelas IA	PA Banjarnegara Kelas IA	05-09-2022
4.	Siti Fadiah, S.Ag, M.H.	Ketua PA Purworejo Kelas IB	Wakil Ketua PA Banjarnegara Kelas IA	06-09-2022
5.	Heru Wahyono, S.H.	Panitera Muda Hukum PA Purbalingga Kelas IB	Panitera Muda Gugatan PA Banjarnegara Kelas IA	09-08-2022

- Mutasi Masuk Jabatan Sama, sebanyak 6 (enam) orang pegawai:

No	Nama	Sebelum	Sesudah	TMT
1.	Drs. H. Sasmiruddin, M.H.	Hakim PA Pekanbaru Kelas IA	Hakim PA Banjarnegara Kelas IA	01-02-2022
2.	Drs. H.M. Kahfi, S.H., M.H.	Ketua PA Metro Kelas IA	Ketua PA Banjarnegara Kelas IA	10-02-2022
3.	Drs. Ihsan	Hakim PA Tanjung Karang Kelas IA	Hakim PA Banjarnegara Kelas IA	24-02-2022
4.	Drs. H. Salim, S.H., M.H.	Hakim PA Pemalang Kelas IA	Hakim PA Banjarnegara Kelas IA	09-12-2022
5.	Drs. H.M. Mursyid	Hakim PA Pekalongan Kelas IA	Hakim PA Banjarnegara Kelas IA	09-12-2022
6.	Drs. Arifin	Hakim Pa Subang Kelas IA	Hakim PA Banjarnegara Kelas IA	09-12-2022

- Mutasi Keluar Promosi, sebanyak 2 (dua) pegawai:

No	Nama	Sebelum	Sesudah	TMT
1.	Anas Mubarak, S.H.	Panitera Muda Gugatan PA Banjarnegara Kelas IA	Panitera PA Bantul Kelas IB	04-08-2022
2.	Drs. Syahril, S.H., M.H.	Hakim PA Banjarnegara Kelas IA	Hakim Tinggi PTA Kupang NTT	08-09-2022

- Mutasi Keluar Jabatan Sama, sebanyak 4 (empat) pegawai

No	Nama	Sebelum	Sesudah	TMT
1.	Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.Si.	Hakim PA Banjarnegara Kelas IA	Hakim PA Sleman Kelas IA	31-01-2022
2.	Drs. H. Ribat, S.H., M.H.	Wakil Ketua PA Banjarnegara Kelas IA	Wakil Ketua PA Kendal Kelas IA	16-02-2022
3.	Drs. H.M. Kahfi, S.H., M.H.	Ketua PA Banjarnegara Kelas IA	Ketua PA Kebumen Kelas IA	05-09-2022
4.	Siti Fadiah, S.Ag, M.H.	Wakil Ketua PA Banjarnegara Kelas IA	Wakil Ketua PA Palangka Raya Kelas IA	07-12-2022

- Mutasi Keluar Karena Mengundurkan Diri dari Jabatan, sebanyak 0 (nol) pegawai:

No	Nama	Sebelum	Sesudah	TMT
-	-	-	-	-

- Mutasi Masuk Pegawai Baru, sebanyak 3 (tiga) pegawai:

No	Nama	Jabatan	TMT
1.	Dian Novita, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	01-04-2022
2.	Sri Muliawati Setiyadi, S.Sos.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	01-04-2022
3.	Siti Halimah, A.Md	Pengelola Perkara	01-04-2022

- Mutasi Kenaikan Pangkat, sebanyak 2 (dua) pegawai

No	Nama	Periode	Kenaikan Pangkat
1.	Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.	April 2022	IV/d menjadi IV/e
2.	Drs. H. Nangim, M.H.	Oktober 2022	IV/d menjadi IV/e

- Mutasi Kenaikan Gaji Berkala, sebanyak 11 (sebelas) pegawai

No	Nama	Periode
1.	Angkat	Januari 2022
2.	Drs. H. Ihsan, M.H.	Februari 2022
3.	Drs. H. Sasmiruddin, M.H.	Maret 2022
4.	Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.	Maret 2022
5.	Drs. H. Salim, S.H., M.H.	Maret 2022
6.	Toib, S.H.	Maret 2022
7.	Hidayati, Sm. Hk.	Maret 2022
8	Muhammad Irfan, S.H.I	Maret 2022
9.	Helmi Ashari, S.H.	Oktober 2022
10.	Desy Nuzul Mustika, A.Md	Desember 2022
11.	Herwati Ranu Dwiyekti, S.H.	Desember 2022

B. Promosi

Sepanjang tahun 2022 di Pengadilan Agama Banjarnegara telah melaksanakan promosi internal sebagai berikut:

No	Nama	Sebelum	Sesudah	TMT
1.	Muhammad Irfan, S.H.I.	Jurusita Pengganti PA Banjarnegara	Jurusita PA Banjarnegara	11-06-2022
2.	Lia Ratnasari, S.E.	Bendahara PA Banjarnegara	Jurusita Pengganti PA Banjarnegara	09-08-2022

C. Pensiun

Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun dini). Sepanjang tahun 2022 terdapat 2 (dua) pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara yang memasuki masa pensiun yaitu:

No	Nama	Jabatan	TMT
1.	Drs. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag.	Hakim	01-07-2022
2.	Dra. Hj. Siti Syamsiyah	Hakim	01-10-2022

Disamping pensiun, pada tahun 2022 terdapat 1 orang Panitera Pengganti Pengadilan Agama Banjarnegara yang tidak dapat bekerja lagi karena meninggal dunia yaitu **Hidayati, Sm. Hk.** pada tanggal 15 April 2022.

D. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Sepanjang tahun 2022 terdapat beberapa pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengikuti diklat yaitu:

No	Nama	Nama Diklat	Tanggal Pelaksanaan
1.	Herwati Ranu Dwiyekti, S.H.	Latsar CPNS Gol III Gelombang I Angkatan I Tahun 2022	31 Januari s/d 30 April 2022
2.	Desy Nuzul Mustika, A.Md	Latsar CPNS Gol II Gelombang I Angkatan II Tahun 2022	21 Februari s/d 31 Mei 2022
3.	Anas Mubarak, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang I	15 s/d 17 Maret 2022
4.	Ayani, S.Ag	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang I	15 s/d 17 Maret 2022
5.	Aniqotur Rifa''ah, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang I	15 s/d 17 Maret 2022
6.	Abdul Hanief, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang I	15 s/d 17 Maret 2022
7.	Helmi Ashari, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang II	29 s/d 31 Maret 2022
8.	Sri Wahdani, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang II	29 s/d 31 Maret 2022
9.	Hidayati, Sm. Hk.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang II	29 s/d 31 Maret 2022
10.	Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang II	29 s/d 31 Maret 2022
11.	Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	24 s/d 25 Maret 2022
12.	Drs. Syahrial, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	24 s/d 25 Maret 2022

13.	Drs. Sasmirudin, M.H.	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	24 s/d 25 Maret 2022
14.	Helmi Ashari, S.H.	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	24 s/d 25 Maret 2022
15.	Sudiman, S.H.	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	24 s/d 25 Maret 2022
16.	Anas Mubarak, S.H.	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	24 s/d 25 Maret 2022
17.	Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	24 s/d 25 Maret 2022
18.	Lia Ratnasari, S.E.	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	24 s/d 25 Maret 2022
19.	Angkat	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	24 s/d 25 Maret 2022
20.	Berlin	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	24 s/d 25 Maret 2022
21.	Surachman, A.Md.	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	24 s/d 25 Maret 2022
22.	Dika Setiawan	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	24 s/d 25 Maret 2022
23.	Fathul Yasir Fuadi, S.Kom, S.H.	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang & Jasa	28 s/d 30 Maret 2022
24.	Yanuar Fandi Bahtiar, S.Kom	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang & Jasa	28 s/d 30 Maret 2022
25.	Lia Ratnasari, S.E.	Bimbingan Teknis Umum dan Keuangan	28 s/d 30 Maret 2022
26.	Toib, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang III	12 s/d 14 Maret 2022
27.	Helmi Ashari, S.H.	Bimbingan Teknis Yustisial Tenaga Teknis Non-Hakim	03 s/d 05 Agustus 2022
28.	Sri Wahdani, S.H.	Bimbingan Teknis Yustisial Tenaga Teknis Non-Hakim	03 s/d 05 Agustus 2022
29.	Ayani, S.Ag	Bimbingan Teknis Yustisial Tenaga Teknis Non-Hakim	03 s/d 05 Agustus 2022
30.	Anas Mubarak, S.H.	Bimbingan Teknis Yustisial Tenaga Teknis Non-Hakim	03 s/d 05 Agustus 2022
31.	M. Hudan Wicaksono, A.Md	Bimbingan Teknis Yustisial Tenaga Teknis Non-Hakim	03 s/d 05 Agustus 2022
32.	Dian Novita, S.H.	Latsar CPNS Gol III Gelombang I Angkatan III Tahun 2022	15 Agustus s/d 12 November 2022
33.	Sri Muliawati Setiyadi, S.Sos	Latsar CPNS Gol III Gelombang I	15 Agustus s/d 12

		Angkatan IV Tahun 2022	November 2022
34.	Siti Halimah, A.Md	Latsar CPNS Gol II Gelombang II Angkatan VI Tahun 2022	15 Agustus s/d 30 November 2022
35.	Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.	Pembinaan Bidang Kepaniteraan & Kesekretariatan	27 s/d 28 Oktober 2022
36.	Helmi Ashari, S.H.	Pembinaan Bidang Kepaniteraan & Kesekretariatan	27 s/d 28 Oktober 2022
37.	Sudiman, S.H.	Pembinaan Bidang Kepaniteraan & Kesekretariatan	27 s/d 28 Oktober 2022
38.	Ayani, S.Ag	Pembinaan Bidang Kepaniteraan & Kesekretariatan	27 s/d 28 Oktober 2022
39.	Berlin, S.E.	Pembinaan Bidang Kepaniteraan & Kesekretariatan	27 s/d 28 Oktober 2022
40.	Lia Ratnasari, S.E.	Bimbingan Teknis /Sosialisasi Pengembangan & Pengelolaan PNBK	10 November 2022
41.	Fathul Yasir Fuadi, S.Kom., S.H.	Pelatihan Kepemimpinan Pengadilan Mempersiapkan Generasi Emas Mahkamah Agung 2045	16 s/d 25 November 2022
42.	Helmi Ashari, S.H.	Bimbingan Teknis Kepegawaian dan Perencanaan Peradilan Agama	07 s/d 09 Desember 2022
43.	Yanuar Fandi Bahtiar, S.Kom	Bimbingan Teknis Kepegawaian dan Perencanaan Peradilan Agama	07 s/d 09 Desember 2022

Dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai, terdapat 1 (satu) orang pegawai yang mengajukan izin belajar pada tahun 2022 yaitu

No	Nama	Program Pendidikan	Institusi
1.	Fathul Yasir Fuadi, S.Kom., S.H.	Magister Ilmu Hukum (S2)	Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan bidang keuangan meliputi pengelolaan keuangan DIPA dan keuangan perkara. Keuangan DIPA Pengadilan Agama Banjarnegara meliputi 2 (dua) bagan anggaran keuangan yaitu DIPA 01 (DIPA Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 04 (DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama). Pada tahun anggaran 2022 pada DIPA 01 Pengadilan Agama Banjarnegara mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 5.935.140.000,- (lima milyar Sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah), yang tertuang dalam DIPA Nomor: SP DIPA-005.01.2.401106/2022 tanggal 29 November 2021. Sementara untuk DIPA 04 Pengadilan Agama Banjarnegara mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 182.600.000,- (seratus delapan puluh dua ribu enam ratus ribu rupiah) yang tertuang dalam DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor SP DIPA-005.04.2.401107/2022 tanggal 29 November 2021.

- DIPA 01

Ringkasan realisasi DIPA 01 dapat dilihat sebagai berikut:

No	Klasifikasi Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase Penyerapan
1	Belanja Pegawai	Rp. 4.638.168.000	Rp. 4.636.089.096	99,96%
2	Belanja Barang	Rp. 1.209.972.000	Rp. 1.207.943.463	99,83%
3	Belanja Modal	Rp. 87.000.000	Rp. 86.925.000	99,91%
	Jumlah	Rp. 5.935.140.000	Rp. 5.930.957.559	99,93%

Secara rinci berikut serapan realisasi per komponen belanja:

No	Klasifikasi Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.574.990.000	1.574.983.260	100%
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.000	20.661	93,91%
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	117.189.000	117.180.546	99,99%
4	Belanja Tunj. Anak PNS	21.143.000	21.133.316	99,95%
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	38.710.000	38.700.000	99,97%
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.244.790.000	2.244.780.000	100%

7	Belanja Tunj. PPh PNS	324.700.000	324.685.213	100%
8	Belanja Tunj. Beras PNS	69.170.000	69.161.100	99,99%
9	Belanja Uang Makan PNS	234.204.000	232.250.000	99,17%
10	Belanja Tunj. Umum PNS	13.250.000	13.195.000	99,58%
11	Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran	263.884.000	263.863.950	99,85%
12	Langganan Daya dan Jasa	310.646.000	309.739.025	99,71%
13	Pemeliharaan Kantor	398.835.000	398.788.388	99,99%
14	Pembayaran Operasional Kantor	64.591.000	64.591.000	100%
15	Pelantikan dan Sumpah Jabatan	9.736.000	9.727.000	99,91%
16	Rapat Koordinasi Internal	8.640.000	8.637.500	99,97%
17	Konsultasi/Koordinasi	56.340.000	56.326.900	99,98%
18	Konsultasi ke KPPN	3.300.000	3.300.000	100%
19	Operasional Hakim	84.000.000	83.200.000	99,05%
20	Penanganan Covid-19	5.000.000	4.769.700	95,39%
21	Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi	37.000.000	37.000.000	100%
22	Pengadaan Sarana Disabilitas	20.000.000	20.000.000	100%
23	Pengadaan Prasarana Disabilitas	30.000.000	29.925.000	99,75%
24	Belanja jasa Penanganan Pandemi	5.000.000	5.000.000	100%
	Jumlah	5.935.140.000	5.930.957.559	99,93 %

Khusus untuk belanja pengadaan alat pengolah data, digunakan untuk pengadaan 2 (dua) unit *personal computer* untuk Kepaniteraan dan 2 (dua) unit *printer* yang dilaksanakan pada bulan April 2022.

Selama pelaksanaan anggaran DIPA 01, Pengadilan Agama Banjarnegara melaksanakan revisi anggaran sebanyak 6 (enam) kali revisi anggaran untuk beberapa keperluan dengan keperluan Berikut rincian revisi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Banjarnegara sepanjang tahun 2022:

No	Revisi Ke	Tanggal Revisi	Keperluan Revisi
1	Revisi I	14-03-2022	Perubahan Rencana Penarikan Halaman III DIPA
2	Revisi II	15-07-2022	Perubahan Rencana Penarikan Halaman III DIPA
3	Revisi III	08-10-2022	Perubahan Rencana Penarikan Halaman III DIPA
4	Revisi IV	14-11-2022	Penambahan Anggaran Daya dan Jasa
5	Revisi V	29-11-2022	Penyelesaian Pagu Minus Tingkat Jawa Tengah
6	Revisi VI	28-12-2022	Penyelesaian Pagu Minus Tingkat Mahkamah Agung

- DIPA 04

Ringkasan realisasi DIPA 04 dapat dilihat sebagai berikut:

No	Klasifikasi Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase Penyerapan
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang	181.600.000	180.995.250	99,67%
3	Belanja Modal	-	-	-
	Jumlah	181.600.000	180.995.250	99,67%

Secara rinci berikut serapan realisasi per akun belanja:

No	Klasifikasi Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1	Pembebasan Biaya Perkara	50.000.000	49.434.250	98,87%
2	Penyelesaian Perkara di Luar Gedung Pengadilan	21.800.000	21.800.000	100%
3	Jasa Konsultan Pos Bantuan Hukum	60.180.000	60.108.000	100%
4	Percepatan Penyelesaian Perkara	49.620.000	49.581.000	99,92%
	Jumlah	181.600.000	180.995.250	99,67%

Selama pelaksanaan anggaran DIPA 04, Pengadilan Agama Banjarnegara melaksanakan revisi anggaran sebanyak 3 (tiga) kali revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Revisi Ke	Tanggal Revisi	Keperluan Revisi
1	Revisi I	17-03-2022	Perubahan Rencana Penarikan Halaman III DIPA
2	Revisi II	15-07-2022	Perubahan Rencana Penarikan Halaman III DIPA
3	Revisi III	08-10-2022	Perubahan Rencana Penarikan Halaman III DIPA

- Keuangan Perkara

Memasuki tahun 2022, saldo keuangan perkara pada Pengadilan Agama Banjarnegara sebesar Rp. 125.981.000 (*seratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah*). Dalam perjalanannya, pengelolaan perkara menerima uang panjar perkara total sebesar Rp. 2.666.241.000 (*dua milyar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*) dan dipergunakan untuk pengelolaan perkara sebesar Rp. 2.665.661.600 (*dua milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus*

rupiah) sehingga saldo akhir tahun 2022 sebesar Rp. 126.560.400 (*seratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah*).

Berikut adalah rincian pemasukan dan pengeluaran biaya perkara berdasarkan Buku Induk Keuangan Perkara:

Bulan	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Januari 2022	125.981.000	318.226.000	251.987.000	192.220.000
Februari 2022	192.220.000	192.546.000	178.973.000	205.793.000
Maret 2022	205.793.000	238.864.000	266.684.500	177.972.500
April 2022	177.972.500	135.605.000	154.333.500	159.244.000
Mei 2022	159.244.000	286.520.000	227.615.000	218.149.000
Juni 2022	218.149.000	267.115.000	279.248.500	206.015.500
Juli 2022	206.015.500	219.140.000	236.064.500	189.091.000
Agustus 2022	189.091.000	235.465.000	221.646.000	202.910.000
September 2022	202.910.000	245.580.000	239.974.600	208.515.400
Oktober 2022	208.515.400	196.090.000	216.069.000	188.536.400
November 2022	188.536.400	191.450.000	209.181.000	170.805.400
Desember 2022	170.805.400	139.640.000	183.885.000	126.560.400
Total		2.666.241.000	2.665.661.600	

Pemasukan penerimaan keuangan perkara adalah dari panjar biaya perkara sementara pengeluaran yang ada adalah untuk pengelolaan perkara. Berikut adalah rincian penggunaan ataupun pengeluaran keuangan perkara:

No	Uraian	Jumlah
1	Biaya Proses/ATK/Pemberkasan	165.550.000
2	Biaya Panggilan	1.105.525.000
3	Biaya Penerjemah	0
4	Biaya Pemberitahuan	275.635.000
5	Biaya Sita	0
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	10.500.000
7	Biaya Sumpah	0
8	Biaya Saksi Ahli	0
9	Biaya Pengiriman	1.758.100

10	Biaya Materai	33.020.000
11	PNBP Biaya Pendaftaran	99.730.000
12	PNBP Redaksi	33.020.000
13	PNBP Lain-lain	86.270.000
14	Pengembalian Sisa Panjar	835.998.500
15	Biaya Lain-lain	0
	Jumlah Pengeluaran	2.647.006.600

- **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Berikut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima sepanjang tahun 2022:

No	Akun	Uraian Penerimaan	Jumlah
PNBP DIPA 01			
1	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung & Bangunan	1.200.000
		Jumlah	1.200.000
PNBP DIPA 04			
1	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	99.740.000
2	425239	Pendapatan Kejaksaan & Peradilan Lainnya	205.413.000
		Jumlah	305.153.000

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

- **Kendaraan Dinas**

Sampai dengan berakhirnya tahun 2022, Pengadilan Agama Banjarnegara mempunyai 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda 4 dan 5 (lima) unit kendaraan dinas roda 2. Berikut data kendaraan dinas Pengadilan Agama Banjarnegara:

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi	Ket
Kendaraan Dinas Roda 4				
1	Toyota Kijang R 9503 YD	1996	Rusak Ringan	
2	Toyota Innova R 17 D	2008	Baik	
3	Toyota Avanza R 1032 XD	2007	Baik	

Kendaraan Dinas Roda 2				
1.	Honda Supra X R 9991 JD	2004	Baik	
2.	Honda Mega Pro R 9606 LD	2006	Baik	
3.	Suzuki Thunder R 9920 LD	2007	Baik	
4.	Honda Supra X R 9643 MD	2007	Baik	
5.	Honda Supra X R 9810 MD	2008	Baik	

- Gedung Bangunan Kantor

Pengadilan Agama Banjarnegara mempunyai 1 (satu) gedung kantor dan 2 (dua) rumah dinas dengan keterangan sebagai berikut:

1. Gedung Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara, yang beralamatkan di Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Identitas gedung tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan : Sertifikat Hak Pakai No. 16
 - b. Luas Tanah : 3000 m²
 - c. Luas Bangunan Utama : 1250 m²
 - d. Luas Bangunan Tambahan:
 - Rumah Ibadah : 36 m²
 - Rumah Genset : 20 m²
 - Pagar Keliling : 430 m
2. Rumah Dinas Pengadilan Agama Banjarnegara, yang beralamatkan di Jl. KH Ahmad Dahlan Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Identitas bangunan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan : Sertifikat Hak Pakai No. 00005
 - b. Luas Tanah : 496 m²
 - c. Luas Bangunan : 300 m²
 - d. Penggunaan : Mess Hakim dan Pegawai

3. Rumah Dinas Pengadilan Agama Banjarnegara, yang beralamatkan di Jl. Dahlia No. 69 Kelurahan Sokanandi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Identitas gedung tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan : Sertifikat Hak Pakai No. 00011
 - b. Luas Tanah : 180 m²
 - c. Luas Bangunan : 150 m²
 - d. Penggunaan : Rumah Dinas Ketua
4. Sarana dan Prasarana Kantor

Berikut adalah kondisi sarana dan prasarana gedung Pengadilan Agama Banjarnegara sampai dengan akhir tahun 2022

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1 ruang	
2	Ruang Wakil Ketua	1 ruang	
3	Ruang Hakim	1 ruang	
4	Ruang Panitera	1 ruang	
5	Ruang Sekretaris	1 ruang	
6	Ruang Panmud dan Panitera Pengganti	1 ruang	
7	Ruang Kepaniteraan	1 ruang	
8	Ruang Kesekretariatan	1 ruang	
9	Ruang Sidang	2 ruang	
10	Ruang Tunggu	1 ruang	
11	Ruang Server	1 ruang	
12	Ruang Pelayanan	1 ruang	
13	Ruang Mediasi	1 ruang	
14	Ruang Arsip	2 ruang	
15	Ruang Perpustakaan	1 ruang	
16	Mushalla	1 ruang	
17	Ruang Bermain Anak	-	
18	Ruang Laktasi	-	
19	Toilet	12 ruang	
20	Ruang Aula	1 ruang	
Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
21	Genset	1 unit	

22	Mesin Fotokopi Lainnya	1 unit	
23	Lemari Kayu	11 unit	
24	Rak Besi	8 unit	
25	Rak Kayu	1 unit	
26	Filling Cabinet Besi	6 unit	
27	Brangkas	2 unit	
28	Buffet	2 unit	
29	CCTV	1 paket	10 titik
30	Papan Visual	13 unit	
31	Globe	1 unit	
32	Meja Kerja Kayu	56 unit	
33	Kursi Besi/Metal	115 unit	
34	Kursi Kayu	25 unit	
35	Sice	7 unit	
36	Meja Rapat	2 unit	
37	Meja Komputer	2 unit	
38	Meja Resepsionis	2 unit	
39	Gantungan Jas	1 unit	
40	Meubelair Lainnya	2 unit	
41	Jam Elektronik	9 unit	
42	AC Central	2 unit	
43	AC Split	13 unit	
44	Kipas Angin	4 unit	
45	Televisi	3 unit	
46	Amplifier	1 unit	
47	Loudspeaker	5 unit	
48	Lambang Garuda Pancasila	4 unit	
49	Tiang Bendera	2 unit	
50	Kaca Hias	8 unit	
51	Palu Sidang	2 unit	
52	Lambang Instansi	1 unit	
53	Bracket Standing Peralatan	3 unit	
54	UPS	8 unit	

55	Teropong	1 unit	
56	Pesawat Telepon	2 unit	
57	Faximile	1 unit	
58	Fingerprint	1 unit	
59	Komputer Jaringan Lainnya	2 unit	
60	PC Unit	36 unit	
61	Laptop	24 unit	
62	Hard Disk	1 unit	
63	CPU	10 unit	
64	Monitor	10 unit	
65	Printer	19 unit	
66	Scanner	4 unit	
67	Keyboard	3 unit	
68	Server	1 unit	
69	Router	1 unit	
70	Alat Tenis Meja	1 unit	
71	Monografi	91 unit	
72	Software Komputer	2 unit	
73	Mesin Antrian	1 unit	
74	Audio Mixing Console	1 unit	
75	Camera Conference	1 unit	
76	Kursi Dorong	1 unit	
77	Walker Polding	1 unit	
78	LCD Monitor	1 unit	
79	Alat Kedokteran Lainnya	4 unit	

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

- Implementasi e-Court

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, maka setiap Pengadilan wajib menggunakan e-court dalam penerimaan perkara, e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran

secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Banjarnegara menerima pendaftaran perkara melalui e-Court sebanyak 978 perkara. Berikut rincian pelaksanaan penerimaan pendaftaran perkara melalui e-Court di Pengadilan Agama Banjarnegara:

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Izin Poligami	-
2	Pencegahan Perkawinan	-
3	Penolakan Perkawinan	-
4	Pembatalan Perkawinan	-
5	Kelalaian Kewajiban suami/istri	-
6	Cerai Talak	258
7	Cerai Gugat	706
8	Harta Bersama	1
9	Penguasaan Anak	2
10	Nafkah oleh Ibu	-
11	Hak-hak Bekas Istri	-
12	Pengesahan Anak	-
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-
14	Perwalian	-
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-
16	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	-
17	Ganti Rugi terhadap Wali	-
18	Asal Usul Anak	-
19	Perkawinan Campur	-
20	Istbat Nikah	4
21	Izin Kawin	-
22	Dispensasi Kawin	2
23	Wali Adhol	-
24	Kewarisan	1
25	Wasiat	-

26	Lain-lain	3
27	Ekonomi Syariah	-
28	P3HP	1
	Jumlah total	978

- Implementasi SIPP

Kemudahan penyediaan informasi perkara tidak terlepas dari peran aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang telah terintegrasi dengan website Pengadilan Agama Banjarnegara sehingga informasi perkara yang sangat dibutuhkan seperti informasi status perkara dan jadwal sidang dapat diperoleh dengan mudah. Terdapat 2 (dua) jenis SIPP yang disediakan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara yaitu SIPP yang dapat diakses oleh masyarakat umum dengan alamat di sipp.pa-banjarnegara.go.id. SIPP tersebut digunakan mengakses informasi perkara mulai dari jadwal sidang sampai akses putusan. Pada SIPP versi umum ini, data identitas dan alamat disamarkan sesuai SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Kemudian versi SIPP yang kedua adalah versi SIPP yang dipakai oleh pegawai sebagai sistem untuk mengelola perkara. Aplikasi SIPP tersebut telah dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh Pengadilan Agama Banjarnegara mulai dari pendaftaran perkara, pembuatan Penunjukan Majelis Hakim (PMH), Penetapan Hari Sidang, relaas panggilan, keuangan perkara, pembuatan jadwal sidang, berita acara persidangan, hingga produk putusan dan akta cerai. Untuk saat ini versi SIPP yang dipakai adalah versi 4.1.1.

Untuk mengelola, mengawal dan mengembangkan berlakunya SIPP, Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor : W11-A5/45/HK.05/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Tim IT yang didalamnya memuat penanggung jawab Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Secara periodik, tim ini mengadakan pertemuan untuk membahas perbaikan dan pengembangan IT di Pengadilan Agama Banjarnegara. Pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Agama Banjarnegara, telah mengalami kemajuan yang signifikan dimana masing-masing hakim dan panitera pengganti serta jurusita/jurusita pengganti seluruhnya telah

menggunakan perangkat PC yang terkoneksi ke server sebagai pusat data. Jaringan di Pengadilan Agama Banjarnegara juga menggunakan *system sharing*, sehingga antara satu PC dengan PC yang lainnya dapat data dan perangkat computer seperti printer yang terhubung dalam satu jaringan.

Berdasarkan penilaian triwulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banjarnegara memperoleh nilai SIPP yang stabil dan terus meningkat setiap triwulannya. Berikut adalah nilai tiap triwulan SIPP Pengadilan Agama Banjarnegara sepanjang tahun 2022:

Satker	Nilai Triwulan I	Nilai Triwulan II	Nilai Triwulan III	Nilai Triwulan IV
PA Banjarnegara	19,43/20 97,15	19,41/20 97,05	19,5/20 97,5	-saat laporan disusun nilai belum keluar-

Sumber penilaian SIPP tersebut adalah berdasarkan surat-surat dari Dirjen Badilag sebagai berikut:

1. Surat Dirjen Badilag Nomor 4598/DJA/OT.01.2/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 Nilai Akhir Penilaian Prestasi Kinerja Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Agama Triwulan III Tahun 2022
2. Surat Dirjen Badilag Nomor 3345/DJA/OT.01.2/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 Nilai Akhir Penilaian Prestasi Kinerja Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Agama Triwulan II Tahun 2022
3. Surat Dirjen Badilag Nomor 2570/DJA/OT.01.2/4/2022 tanggal 28 April 2022 Nilai Akhir Penilaian Prestasi Kinerja Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Agama Triwulan I Tahun 2022

Dalam hal penyediaan hardware untuk penunjang SIPP, pada tahun 2022 Pengadilan Agama Banjarnegara mendapat pagu Belanja Modal 2 (dua) unit Personal Computer dan 2 (dua) unit printer untuk Kepaniteraan senilai Rp. 37.000.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjamin Mutu (APM) adalah sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai sebuah bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Pengadilan Agama. Orientasi dari APM adalah berprinsip pada efektifitas dan efisiensi untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama Banjarnegara kemudian menindaklanjuti dengan membentuk Tim Akreditasi Penjamin Mutu melalui SK Nomor W11-A5/3302/OT.01/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Penunjukan Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Banjarnegara yang pada perjalanannya mengalami beberapa kali revisi susunan tim dan terakhir melalui SK Nomor W11-A5/2426/OT.01.2/IX/2022 tanggal 12 September 2022. Adapun struktur tim tersebut yaitu:

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.	Ketua	Top Manager
2.	Siti Fadiah, S.Ag, M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Sudiman, S.H.	Sekretaris	Sekretaris I
4.	Helmi Ashari, S.H.	Panitera	Sekretaris II
Tim Assesor Internal			
1.	Drs. H. Sasmirudin, M.H.	Hakim	Koordinator
2.	Drs. H. Ihsan, M.H.	Hakim	Sekretaris
3.	Dra. Hj. Siti Syamsiyah	Hakim	Anggota
4.	Drs. H. Mahli, S.H.	Hakim	Anggota
5.	Drs. H. Nangim, M.H.	Hakim	Anggota
Tim Survey Kepuasan Masyarakat			
1.	Ayani, S.Ag.	Panmud Hukum	Koordinator
2.	Heru Wahyono, S.H.	Panmud Gugatan	Sekretaris
3.	Toib, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota
4.	Abdul Hanief, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota
5.	Aniqotur Rifa'ah, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota

6.	Angkat	Jurusita	Anggota
7.	Sri Hidayati	Jurusita Pengganti	Anggota
8.	Herwati Ranu Dwiyekti, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
9.	Dian Novita, S.H.	CPNS	Anggota
10.	Berlin, S.E.	PPNPN	Anggota
11.	M. Hudan Wicaksono, A.Md	PPNPN	Anggota
12.	Eling Setiawati, S.H.I.	PPNPN	Anggota
13.	Sri Widiyanti	PPNPN	Anggota
Tim Pengendali Dokumen			
1.	Fathul Yasir Fuadi, S.Kom, S.H.	Kasub PTIP	Koordinator
2.	Wahyu Puji Leksono, S.Kom	Kasub Umum & Keuangan	Sekretaris
3.	Hj. Sri Wahdani, S.H.	Panmud Permohonan	Anggota
4.	Yanuar Fandi Bahtiar, S.Kom	Kasubbag Kepegawaian Ortala	Anggota
5.	Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H	Panitera Pengganti	Anggota
6.	Muh. Irfan, S.H.I.	Jurusita	Anggota
7.	Lia Ratnasari, S.E.	Jurusita Pengganti	Anggota
8.	Desy Nuzul Mustika, A.Md	Pengadministrasi Perkara	Anggota
9.	Sri Muliawati Setiyadi, S.Sos	CPNS	Anggota
10.	Siti Halimah, A.Md	CPNS	Anggota
11.	Surachman, A.Md	PPNPN	Anggota
12.	Siti Wakhidah Hajar, S.Kom	PPNPN	Anggota
13.	Dwi Urp Diah, S.I.Pust	PPNPN	Anggota

Berdasarkan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Nomor : 531/DjA.3/HM.00/02/2022, tanggal 9 Februari 2022 perihal Hasil Rapat Komite Keputusan Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2021, Pengadilan Agama Banjarnegara berhasil mempertahankan akreditasi A (Excellent) dan bahkan meraih bintang 3 yang berarti meraih nilai akhir di atas 90. Atas penilaian tersebut Pengadilan Agama Banjarnegara siap untuk dilaksanakan penilaian ulang untuk *surveillance* tahun 2022 dengan tim penjamin mutu seperti tersebut di atas.

Meski secara struktur tim organisasi sudah lengkap dan pendokumentasian kegiatan untuk penilaian APM juga telah lengkap sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3862/DJA/HM.00/9/2022 tanggal 15 September 2022 namun untuk tahun 2022 ternyata tidak diadakan *assesment*.

Kebijakan peniadaan *assesment* oleh Badan Peradilan Agama itu dikeluarkan melalui surat nomor 4095/DjA.3/HM.00/9/2022 tanggal 5 Oktober 2022 terkait adanya *refocusing* anggaran. Oleh karena itu dengan demikian pada tahun 2022 predikat A (Excellent) Bintang 3 Pengadilan Agama Banjarnegara masih tetap dapat dipertahankan.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah program unggulan Mahkamah Agung yang juga merupakan bagian dari penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu. Program ini mulai dikenalkan sejak Tahun 2017 di beberapa pengadilan pada Mahkamah Agung dan dalam perkembangannya program tersebut dilaksanakan di seluruh pengadilan Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu loket terpadu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya Pengadilan.

Program PTSP sendiri terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Badilag. Dengan adanya PTSP diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (*frontline*) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan. Dengan interaksi yang dibatasi, diharapkan dapat mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat menjurus kepada hal-hal yang bersifat koruptif.

Pengadilan Agama Banjarnegara sejak diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama telah membuat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan menempatkan petugas layanan di loket-loket di mana para pihak

pencari keadilan dapat meminta layanan dan informasi tentang Pengadilan. PTSP pada Pengadilan Agama Banjarnegara dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor W11-A5/3248/KP.01/XI/2018 tanggal 13 November 2018 dengan layanan sebagai berikut:

1. Layanan Pendaftaran Perkara
2. Layanan Pengambilan Produk
3. Layanan Pembayaran Biaya
4. Layanan Informasi dan Pengaduan

Selain layanan utama tersebut, Pengadilan Agama Banjarnegara juga bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memberikan layanan tambahan yang terintegrasi dengan PTSP. Adapun layanan tersebut yaitu:

1. Layanan Bank, bekerjasama dengan PT Bank Syariah Indonesia KCP Banjarnegara S. Parman berdasarkan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor W11-A5/2528/HM.01/IX/2022 dan Nomor 22/005-PKS/348 tanggal 23 September 2022 tentang Penyediaan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan.
2. Layanan Pos, bekerjasama dengan PT Pos Indonesia Cabang Banjarnegara berdasarkan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor W11-A5/2519/HM.01.1/IX/2022 dan Nomor 228/BISKURLOG/PENJUALAN/IV/0922 tanggal 23 September 2022 tentang Pembukaan Loker Pos di Pengadilan Agama Banjarnegara.
3. Layanan Bantuan Hukum, bekerjasama dengan LBH Banjarnegara berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor W11-A5/208/HM.01.1/I/2022 dan Nomor 002/Posbakum.PA.Ba/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Kegiatan Jasa Layanan Dan Konsultasi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2022.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi pelayan publik akhir-akhir ini berkaitan erat dengan pemanfaatan teknologi. Dukungan teknologi yang semakin berkembang serta masyarakat yang sudah semakin modern dalam menggunakan berbagai media elektronik membuat inovasi pelayanan publik banyak berkaitan erat dengan pemanfaatan teknologi informasi. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga tidak ketinggalan untuk

membuat berbagai macam inovasi pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi. Dimulai tahun 2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama membuat 11 Aplikasi Inovasi yang terangkum dalam sebuah sistem bernama ACO (Auto Court Online) Integrated Information System yang wajib untuk diterapkan di seluruh Pengadilan Agama. Adapun 11 aplikasi tersebut yaitu:

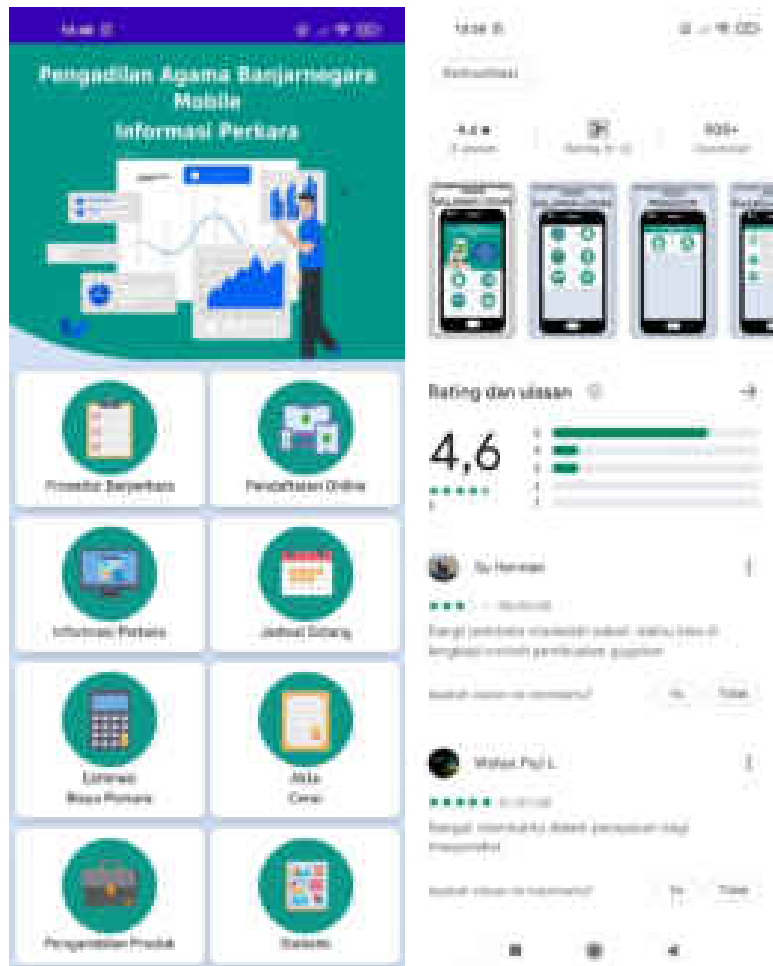
1. **Aplikasi Notifikasi Perkara**, berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berperkara terkait perkembangan status perkara berjalan melalui media SMS.
2. **Aplikasi Informasi Produk Pengadilan**, berfungsi memberikan informasi kepada pihak berperkara secara *realtime* mengenai layanan dan produk pengadilan.
3. **Aplikasi Antrian Sidang**, berfungsi memberikan pilihan kepada para pihak atau kuasanya untuk menentukan waktu sidang sesuai keinginannya secara online.
4. **Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan**, berfungsi membantu menyajikan status data masyarakat miskin guna pembebasan biaya perkara.
5. **Command Center**, berfungsi sebagai pusat data pengembangan aplikasi, ruang rapat virtual dan pusat pembelajaran jarak jauh.
6. **Aplikasi PNBP Fungsional**, berfungsi menyediakan informasi pengelolaan PNBP secara terintegrasi.
7. **Aplikasi E-Eksaminasi**, berfungsi untuk memberikan penilaian kualitas tenaga teknis dalam menjalankan tugas pokok melalui pemeriksaan berkas perkara secara elektronik.
8. **Aplikasi E-Register**, berfungsi sebagai sarana melakukan validasi dan audit data perkara pada SIPP
9. **Aplikasi E-Keuangan**, berfungsi sebagai sarana pendukung SIPP untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terkait dengan layanan perkara.
10. **Aplikasi Validasi Akta Cerai**, berfungsi sebagai sarana untuk melakukan verifikasi dan validasi akta cerai dengan cara menginput nomor seri dan nomor akta cerai
11. **Aplikasi Gugatan Mandiri**, berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan gugatan/permohonan mandiri secara online

Selain inovasi yang dikembangkan oleh Badilag, Pengadilan Agama Banjarnegara juga mempunyai inovasi-inovasi tersendiri untuk peningkatan

pelayanan kepada masyarakat. Terdapat 12 inovasi Pengadilan Agama Banjarnegara yang berupa aplikasi, baik untuk pelayanan masyarakat maupun penunjang proses bisnis. Adapun bentuk inovasi-inovasi tersebut yaitu:

1. Aplikasi Pengadilan Agama Banjarnegara Mobile

Aplikasi ini adalah aplikasi android yang berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui informasi perkara, jadwal sidang, informasi produk dan statistik perkara di Pengadilan Agama Banjarnegara. Aplikasi ini dapat diunduh di Google Playstore secara gratis dan sampai saat ini telah diunduh lebih dari 100 pengguna. Aplikasi ini terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Agama Banjarnegara sehingga data yang ada selalu *realtime*.

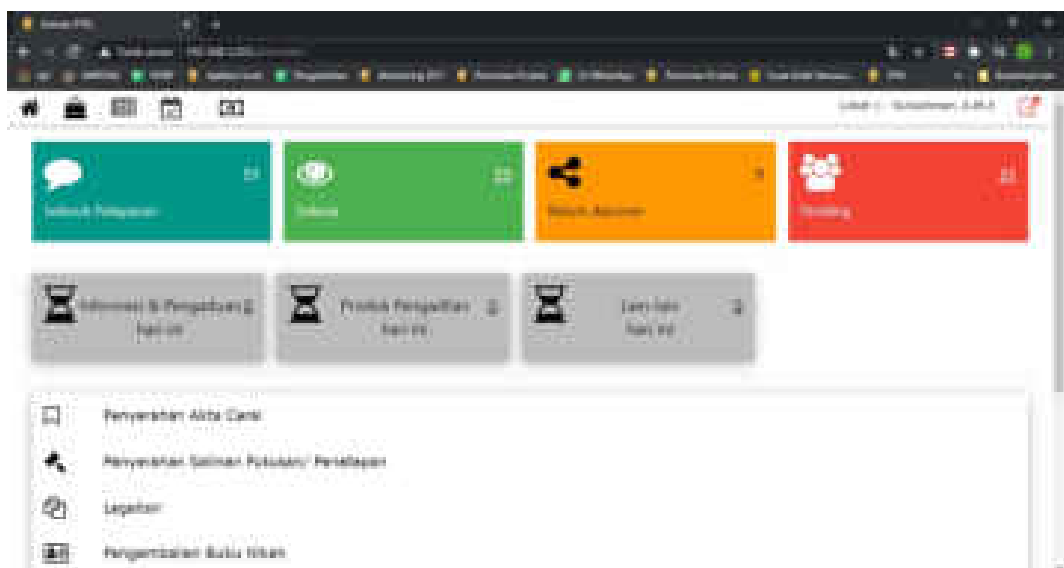


2. Sistema (Sistem Terpadu Pelayanan Masyarakat)

Aplikasi ini berfungsi bagi petugas PTSP untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan di loket PTSP. Prinsip pelaksanaan PTSP di Pengadilan Agama Banjarnegara adalah selain kasir seluruh petugas PTSP dapat melayani semua layanan baik itu berupa Pendaftaran Perkara, Penyerahan Akta Cerai, Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan, Legalisir, Pengembalian Buku Nikah, Pendaftaran Surat Kuasa dan Informasi Pengaduan.

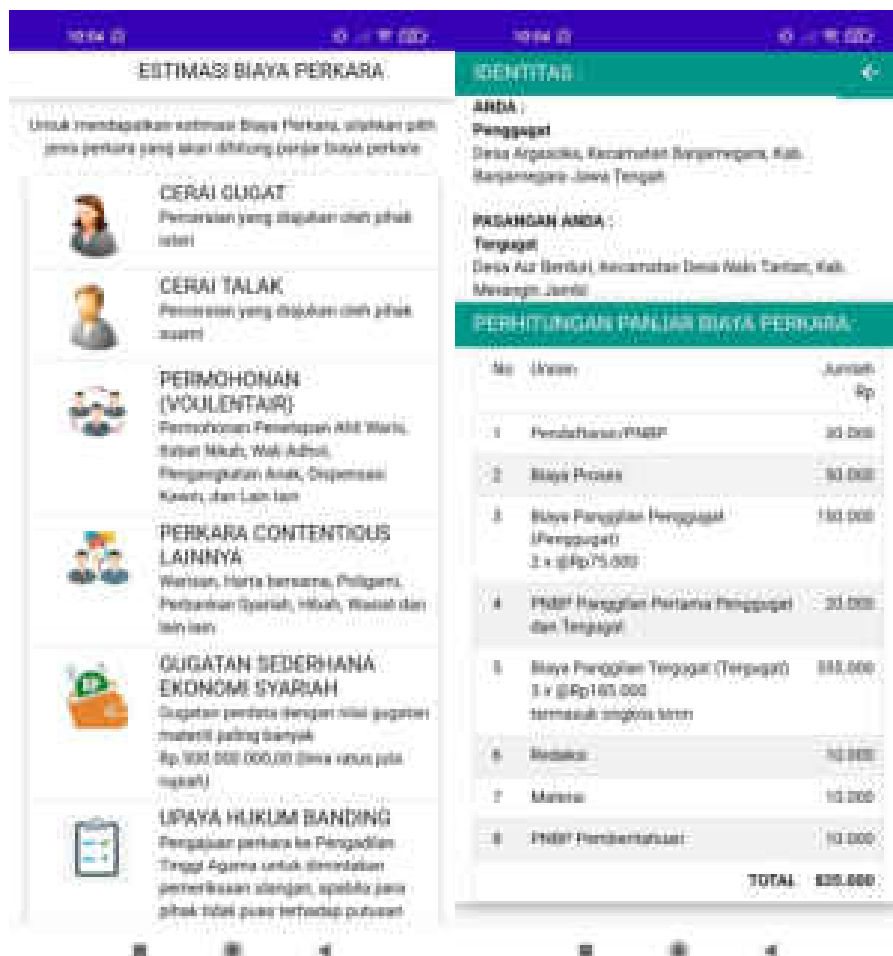
Tata urutan pelayanan dengan menggunakan aplikasi ini adalah pencari keadilan ke petugas nomor antrian dan Petugas akan memberikan nomor antrian sesuai keperluannya. Untuk layanan pengambilan Akta Cerai atau salinan putusan/penetapan, petugas antrian akan memasukkan nomor perkara agar petugas *backoffice* dapat mempersiapkan produk yang akan diambil sehingga petugas PTSP dapat langsung menyerahkan produk tersebut saat memanggil urutan antrian. Untuk layanan pendaftaran perkara, petugas nomor antrian juga sekaligus mengecek kelengkapan dokumen pendaftaran sehingga petugas PTSP tinggal meng-input data pendaftaran pada SIPP sehingga pelayanan PTSP dapat lebih cepat.

Melalui aplikasi ini dapat terinci statistik pelayanan yang diberikan per layanan per petugas beserta jumlah total layanannya. Aplikasi ini hanya dapat diakses melalui jaringan internal Pengadilan Agama Banjarnegara pada alamat <http://192.168.1.253/ptsl/>



3. Kalkulator Panjar

Aplikasi yang bermanfaat untuk menghitung panjar ini terintegrasi dengan Pengadilan Agama Banjarnegara Mobile sehingga cukup dapat memudahkan para pencari keadilan untuk mengakses tanpa perlu menginstall banyak aplikasi. Data radius sebagai bahan penghitungan panjar biaya terkoneksi dengan Komdanas Mahkamah Agung sehingga aplikasi ini dapat menghitung panjar untuk seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Kalkulator Panjar ini dapat menghitung panjar biaya untuk pihak berperkara yang alamatnya tidak diketahui untuk seluruh jenis perkara yang ada.

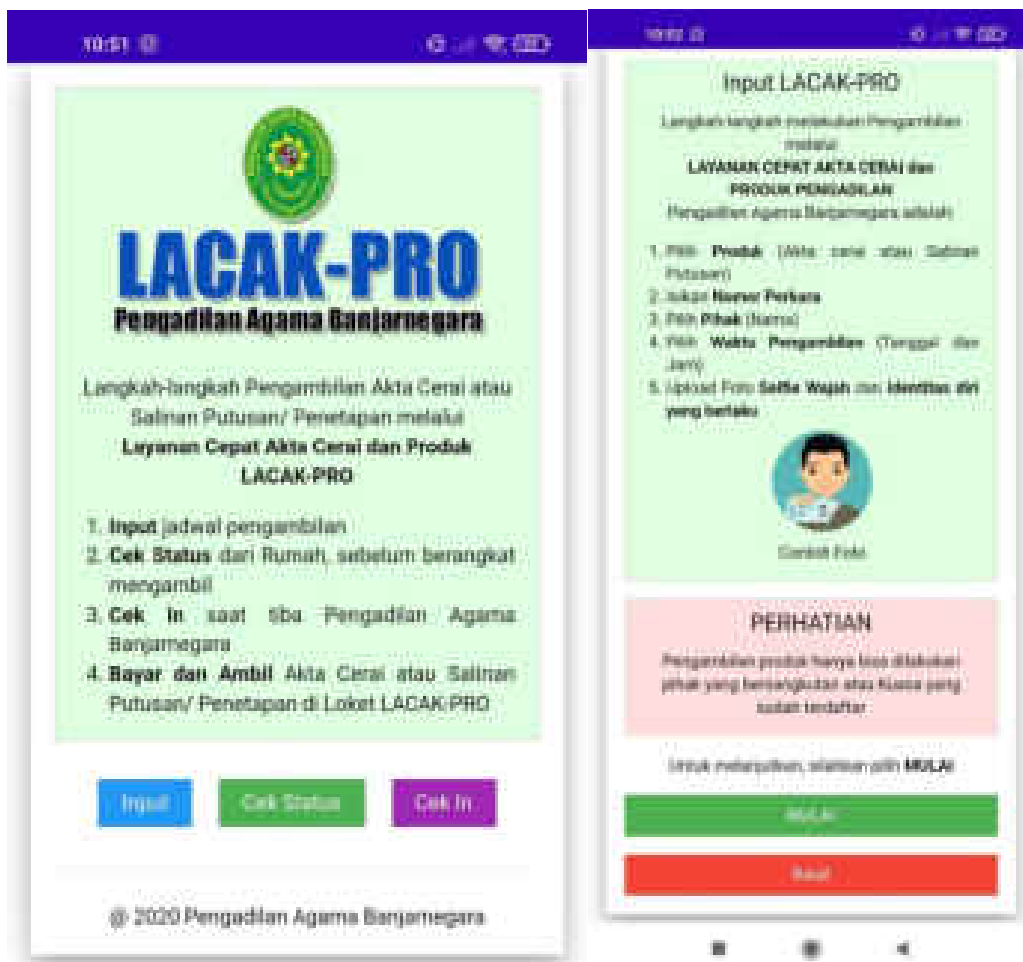


4. Aplikasi Lacak-Pro

Aplikasi ini berfungsi bagi para pencari keadilan untuk memesan pengambilan produk baik itu Akta Cerai maupun salinan putusan/penetapan. Lacak-Pro memberikan informasi penerbitan produk pengadilan untuk dapat diambil oleh para pihak dan dapat menentukan kapan jadwal produk tersebut akan diambil.

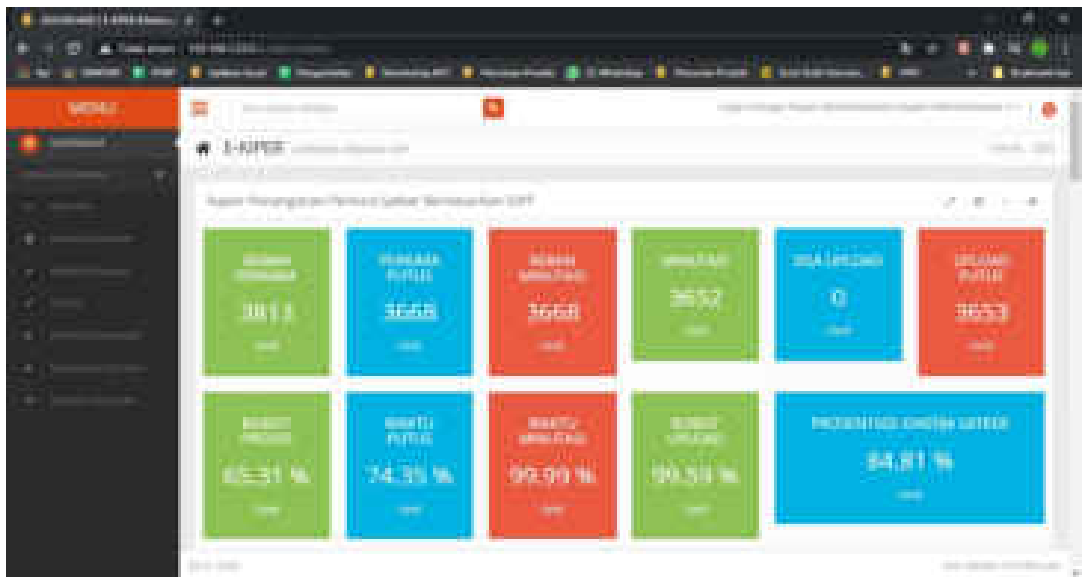
Apabila ada pencari keadilan yang hendak mengambil produk melalui aplikasi Lacak-Pro maka petugas di PTSP akan mendapatkan notifikasi melalui WhatsApp. Petugas pelayanan di PTSP kemudian dapat segera berkoordinasi dengan petugas Akta Cerai di back office untuk menyiapkan berkas yang akan diambil sesuai waktu yang ditentukan sehingga waktu layanan lebih ringkas, tepat dan akurat.

Aplikasi dapat diakses di aplikasi Pengadilan Banjarnegara Mobile pada Menu Pengambilan Akta Cerai.



5. Aplikasi E-Kiper

Aplikasi ini berfungsi bagi internal pengadilan untuk mengontrol kualitas penanganan perkara di Pengadilan Agama Banjarnegara. Melalui aplikasi E-Kiper dari Beban Perkara yang ada dapat dikontrol berapa perkara yang telah putus, telah diminutasi dan telah diupload di Direktori Putusan. Melalui aplikasi E-Kiper dapat diketahui nilai presentase Bobot Proses, Bobot Waktu Putus, Bobot Minutasi, Bobot Upload dan Presentase Nilai Kinerja SIPP Satuan Kerja. Aplikasi E-Kiper diakses internal pegawai namun secara tidak langsung bermanfaat bagi publik karena dengan penanganan perkara yang terkontrol maka kualitas pelayanan publik dalam penanganan perkara dapat ditingkatkan.



6. Narahubung WhatsApp (Notifikasi Perkara Terhubung WhatsApp)

Notifikasi ini adalah pengembangan dari SMS Gateway yang sebelum sudah diterapkan di Pengadilan Agama Banjarnegara. Era teknologi yang semakin berkembang membuat SMS sudah terpinggirkan dan digantikan oleh WhatsApp. Adanya notifikasi melalui WhatsApp adalah jawaban atas permintaan para pencari keadilan yang ingin mengetahui kemajuan perkara mereka tanpa dengan harus bertanya.

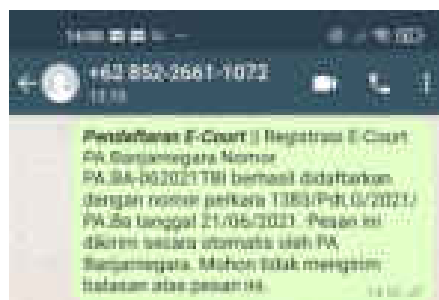
Secara umum, masyarakat yang mendaftarkan perkara dengan menyertakan nomor WhatsApp akan mendapat notifikasi seketika juga setelah perkara dia diregistrasi di SIPP. Selain itu mereka akan mendapat notifikasi

jadwal sidang, notifikasi H-1 sidang sebagai pengingat serta notifikasi penerbitan Akta Cerai.

Notifikasi ini tidak serta merta hanya untuk pencari keadilan, namun juga untuk internal pegawai. Setiap sore pukul 15.00 WIB, Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Panitera Muda Hukum akan mendapat notifikasi rekapitulasi pendaftaran perkara, putusan perkara dan pendaftaran perkara melalui e-Court. Dengan demikian para pejabat terkait tersebut akan selalu mendapat info terkini mengenai perkara-perkara di Pengadilan Agama Banjarnegara.

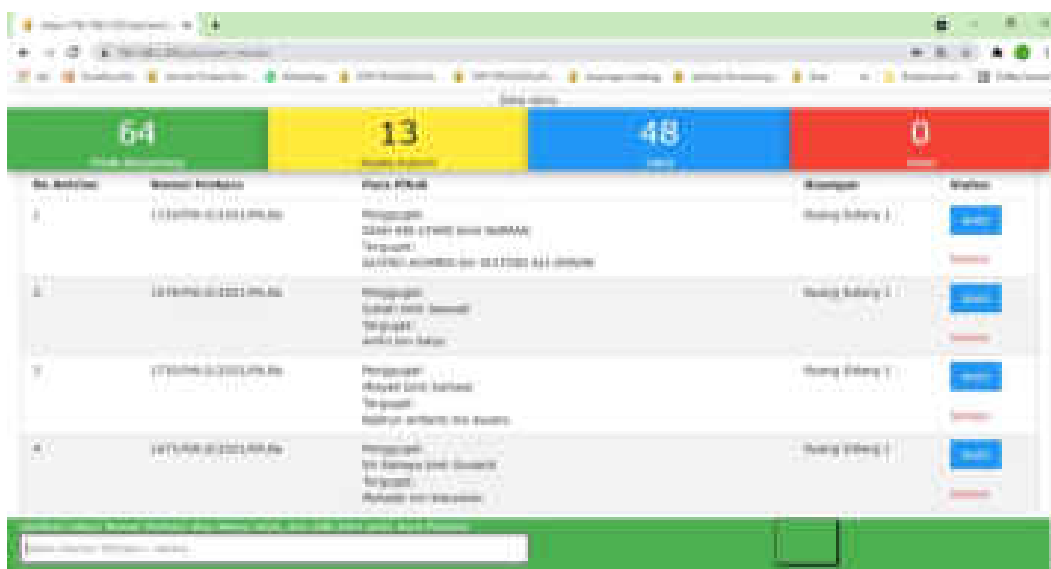
Selain itu Ketua yang belum mengisi Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera yang belum mengisi Penunjukkan Panitera Pengganti dan Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti juga akan mendapat notifikasi untuk segera mengisi sebagai mekanisme kontrol. Bagi para Panitera Pengganti yang lupa untuk mengisi tundaan sidang juga akan mendapat notifikasi untuk segera mengisi jadwal tundaan sidang.

Tak hanya itu, melalui Narahubung WhatsApp ini para pencari keadilan juga dapat memperoleh info *by request* atas informasi yang ingin diketahui. Cukup dengan mengetikkan INFO ke Narahubung WhatsApp pada nomor 085848171718, sistem akan memberi daftar kata kunci untuk mengakses hal yang diinginkan para pencari keadilan tersebut.



7. Bertamu (Buku Elektronik Tamu)

Aplikasi ini adalah aplikasi untuk mencatat data dan informasi tamu, yang disesuaikan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk membagi identitas tamu menjadi Pihak Berperkara dengan Kalung Hijau, Kuasa Hukum dengan Kalung Kuning, Saksi dengan Kalung Biru dan Tamu Lain dengan Kalung Merah. Dengan dilaksanakan secara mandiri maupun dengan bantuan satpam, pengunjung setelah menerima kalung diminta untuk menekan warna sesuai warna kalung tamu di layar monitor touchscreen yang tersedia, dan maka data tamu akan terupdate secara otomatis.



No. Antrian	Nomor Protokol	Nama Pihak	Keterangan	Status
1	010000-010000-0001	Pengadu 0200-00-010000-0001-0001 Teguh 020000-000000-00-010000-00-0001	Daftar Saksi	Siap
2	010000-010000-0002	Pengadu 0200-00-010000-0002-0001 Teguh 020000-000000-00-010000-00-0002	Daftar Saksi	Siap
3	010000-010000-0003	Pengadu 0200-00-010000-0003-0001 Teguh 020000-000000-00-010000-00-0003	Daftar Saksi	Siap
4	010000-010000-0004	Pengadu 0200-00-010000-0004-0001 Teguh 020000-000000-00-010000-00-0004	Daftar Saksi	Siap

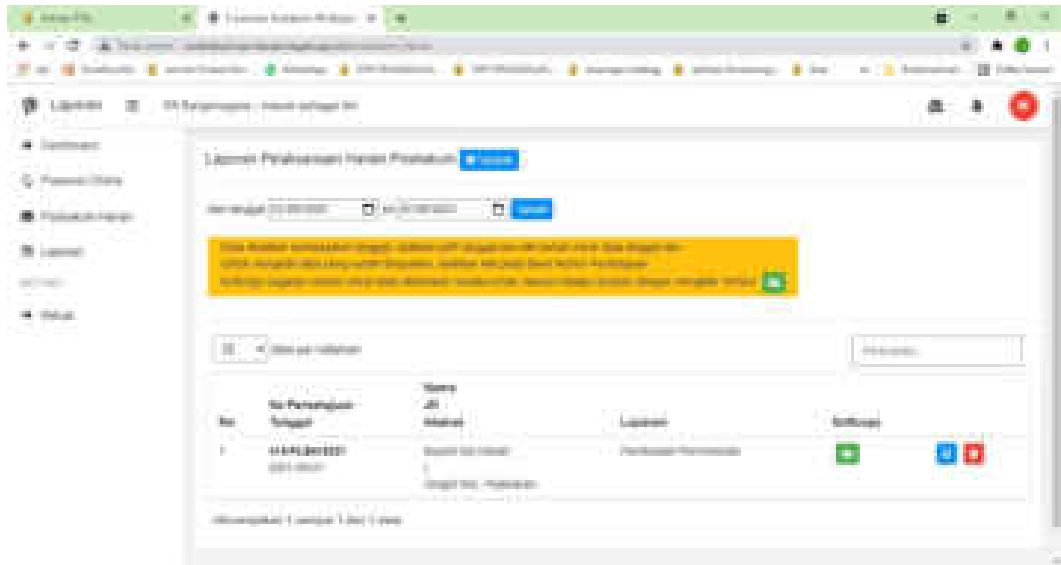
8. E-Posbakum

e-Posbakum adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mempermudah pelaksanaan manajemen Pos Bantuan Hukum (Posbakum). E-Posbakum dapat diakses melalui komputer di alamat posbakum.pa-banjarnegara.go.id.

Pengguna utama e-Posbakum adalah petugas Posbakum Pengadilan Agama Banjarnegara, sementara penerima manfaat dari e-Posbakum adalah Kesekretariatan Pengadilan Agama Banjarnegara khususnya Subbagian Umum dan Keuangan serta masyarakat umum pengguna jasa Posbakum. E-Posbakum, berfungsi untuk membuat dokumen administratif persyaratan posbakum sesuai

Perma 1/2014, sarana untuk menyusun dokumen pencairan anggaran, juga mengontrol pelaksanaan Posbakum oleh Pengadilan Agama Banjarnegara.

Dengan menggunakan E-Posbakum, layanan Posbakum menjadi lebih cepat sehingga masyarakat dapat merasa lebih terlayani. Posbakum adalah muka awal proses pendaftaran perkara, sehingga apabila tidak ada fasilitas untuk mempermudah pelayanan Posbakum maka proses selanjutnya di Loket Pendaftaran PTSP juga dapat tertunda.



9. Data Cepat (Data Akta Cerai Lengkap dan dan Akurat)

Sebelum ada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk mengelola perkara, Pengadilan Agama Banjarnegara sejak tahun 2006 telah menggunakan SIADPA (Sistem Administrasi Pengadilan Agama) untuk mengelola administrasi perkara. Aplikasi Data Cepat menggabungkan database dari SIADPA dan SIPP dengan tujuan untuk mempermudah petugas pelayanan dalam mencari nomor perkara ataupun nomor perkara. Dengan jumlah perkara per tahun sekitar 3500-4000 perkara pencarian data lama secara manual melalui register tentu akan sangat melelahkan. Pengadilan Agama Banjarnegara memanfaatkan data elektronik tersebut untuk mempermudah petugas pengambilan produk.

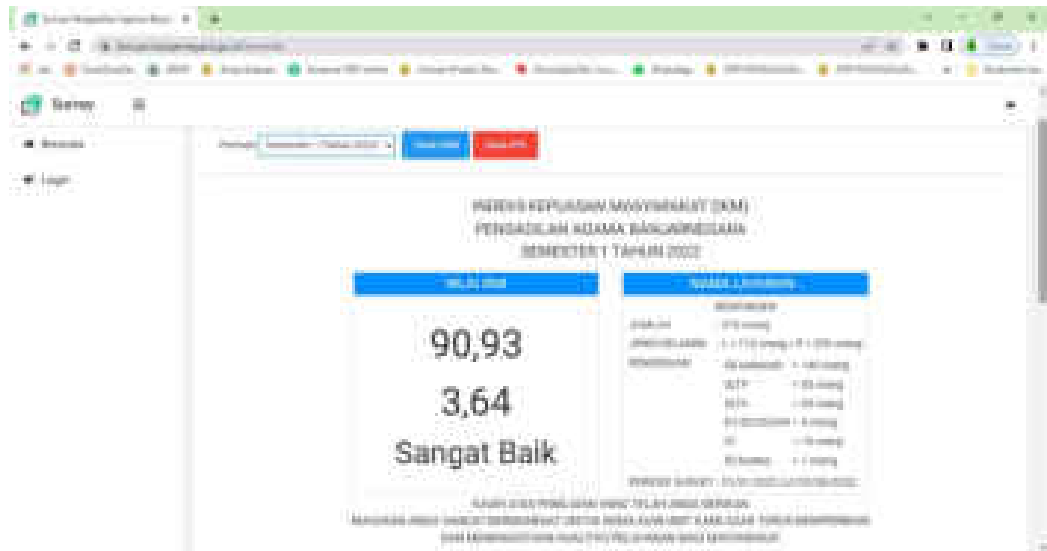


10. **Supervisi (Sistem Penghitung Survey Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Korupsi)**

Supervisi (Sistem Penghitung Survey Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Korupsi) adalah sistem untuk menghitung survey dan akan menampilkan data hasil perhitungan secara otomatis yang dapat diakses publik. Sistem ini juga menyediakan laporan hasil pelaksanaan survey yang juga dapat didownload masyarakat. Akses publik dapat dibuka umum di <https://ikm.pabanjarnegara.go.id/>.

Karakter masyarakat kabupaten Banjarnegara yang mayoritas tinggal di desa dan berpendidikan rendah membuat upaya membuat survey secara elektronik menjadi cukup terkendala. Pengadilan Agama Banjarnegara berupaya mengatasi hal itu dengan tetap melaksanakan survey secara manual namun menyediakan media aplikasi untuk membantu petugas mengolah data hasil survey.

Melalui aplikasi ini setelah petugas menginput data isian dari responden, sistem akan langsung menghitung hasil survey beserta karakteristik respondennya dan data akan tersaji secara otomatis dan dapat diakses melalui jaringan internet.



11. Indika (Integrasi Data SIPP untuk Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

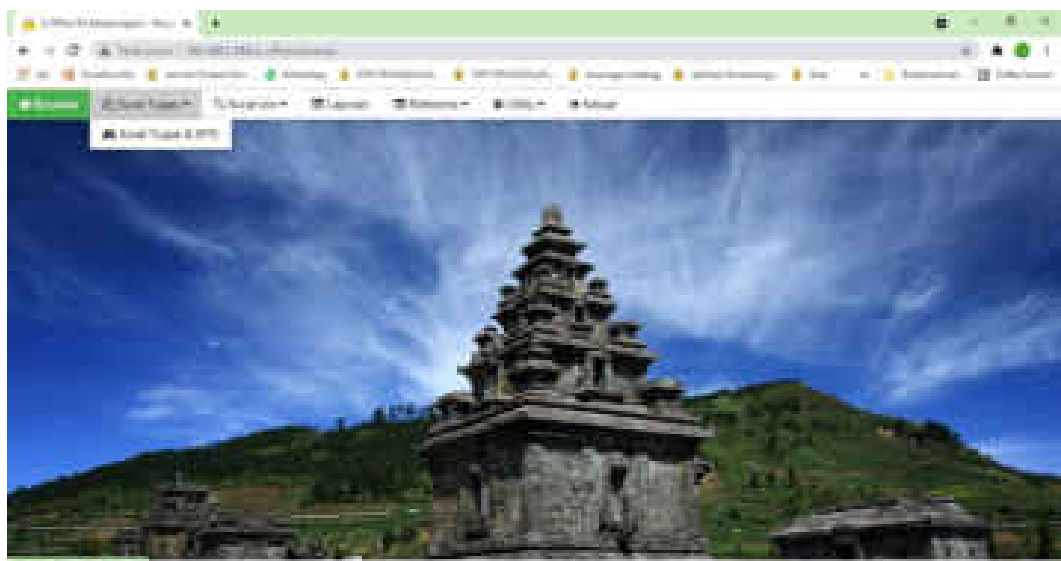
Sistem Informasi Penyelesaian Perkara (SIPP) telah lama dimanfaatkan dan sangat berguna untuk pengelolaan perkara sejak perkara diterima sampai dengan penyerahan produk baik itu berupa salinan putusan maupun Akta Cerai. Kondisi itu dapat dimanfaatkan untuk optimalisasi penyusunan LKJIP. LKJIP yang merupakan penggambaran hasil kinerja atas target yang sebelumnya ditetapkan, hampir semua datanya berasal dari SIPP. Karena para user terkait sudah mengisi data SIPP dengan sistematis dan bahkan SIPP telah menjadi media untuk laporan perkara bulanan ke Pengadilan Tinggi Agama, tentu data yang ada tersebut data diolah sedemikian rupa secara otomatis untuk menyusun LKJIP.

Aplikasi bernama INDIKA (Integrasi Data SIPP dan LKJIP) ini digunakan sebagai sarana untuk monitoring capaian kinerja dan penyusunan LKJIP menggunakan data yang telah disediakan oleh SIPP. Dengan kata lain INDIKA adalah jembatan antara SIPP dan LKJIP. Melalui aplikasi ini, penyusun laporan menjadi tidak perlu repot untuk mengumpulkan data maupun menghitung capaian kinerja karena data akan diambil dari SIPP dan capaian kinerja akan dihitung oleh sistem.

KODE	DESKRIPSI	KETERANGAN	MAYORITAS	MINORITAS	SALDO
1. Modal Disajikan					
1	Modal Disajikan yang Tidak Terpecah dan Belum	1. Modal Disajikan yang Tidak Terpecah dan Belum	100,00	0,00	100,00
2	Modal Disajikan yang Tidak Terpecah dan Belum	2. Modal Disajikan yang Tidak Terpecah dan Belum	100,00	0,00	100,00
3	Modal Disajikan yang Tidak Terpecah dan Belum	3. Modal Disajikan yang Tidak Terpecah dan Belum	100,00	0,00	100,00
4	Modal Disajikan yang Tidak Terpecah dan Belum	4. Modal Disajikan yang Tidak Terpecah dan Belum	100,00	0,00	100,00
2. Utang Disajikan					
5	Utang Disajikan yang Tidak Terpecah dan Belum	5. Utang Disajikan yang Tidak Terpecah dan Belum	100,00	0,00	100,00
6	Utang Disajikan yang Tidak Terpecah dan Belum	6. Utang Disajikan yang Tidak Terpecah dan Belum	100,00	0,00	100,00
7	Utang Disajikan yang Tidak Terpecah dan Belum	7. Utang Disajikan yang Tidak Terpecah dan Belum	100,00	0,00	100,00
8	Utang Disajikan yang Tidak Terpecah dan Belum	8. Utang Disajikan yang Tidak Terpecah dan Belum	100,00	0,00	100,00

12. Amtenaar (Aplikasi Manajemen Cuti, Perjalanan Dinas, Izin dan Surat Tugas Elektronik)

Aplikasi yang digunakan Subbag Kepegawaian untuk melaksanakan administrasi cuti, perjalanan dinas, izin dan surat tugas menggantikan administrasi sebelumnya yang dilaksanakan secara manual. Pengelolaan administrasi manual lemah secara sistem karena tidak dapat mengontrol pelaksanaan manajemen kepegawaian, sehingga adanya aplikasi ini dapat mengatasi permasalahan itu.



Selain inovasi berwujud aplikasi, Pengadilan Agama Banjarnegara juga mempunyai inovasi yang berkaitan kebijakan penyerahan produk pengadilan yang bermanfaat untuk memudahkan pencari keadilan yang tempat tinggalnya jauh dari kantor. Adapun inovasi tersebut yaitu:

1. Penyerahan Produk Pengadilan di Lokasi Sidang di Luar Gedung

Untuk tahun 2022, Pengadilan Agama Banjarnegara menyelenggarakan sidang di luar gedung yang dilaksanakan di aula kecamatan Wanayasa. Sidang di luar gedung tersebut dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2022 selama 20 kali kegiatan sidang. Adapun perkara yang disidangkan adalah perkara yang pihak penggugat/pemohon bertempat tinggal di kecamatan di lereng pegunungan Dieng yaitu kecamatan Wanayasa, Batur, Pejawaran, Pagentan dan Karangkoobar.

Terkait dengan kemudahan tersebut, Pengadilan Agama Banjarnegara juga memfasilitasi pengambilan produk pengadilan di lokasi sidang keliling. Sistem pengambilan produk tersebut adalah melalui sistem *booking* atau pesan dulu. Prosedurnya adalah warga di 5 kecamatan tersebut yang ingin mengambil produknya di lokasi sidang di luar gedung diminta untuk mendaftar di bagian administrasi dan kemudian petugas akan memeriksa di sistem apakah produk tersebut sudah bisa diambil. Apabila produk sudah siap maka warga diminta mengisi formulir pengambilan produk dan dapat untuk mengambil produknya minggu depan. Pengambilan tidak bisa dilaksanakan saat itu juga karena akses lokasi yang cukup jauh dan tidak mungkin petugas membawa produk ke lokasi tersebut sementara produk tersebut belum dipesan untuk diambil.

Meski demikian, inovasi tersebut masih belum terlalu optimal penggunaannya karena belum terlalu banyak warga yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Selain itu pelaksanaan sidang di luar gedung yang hanya sebanyak 20 kali kegiatan juga memperpendek waktu pelayanan yang membuat tidak banyak warga memanfaatkan fasilitas tersebut walaupun dari sisi perkara yang disidangkan tercatat sejumlah 147 perkara disidangkan.

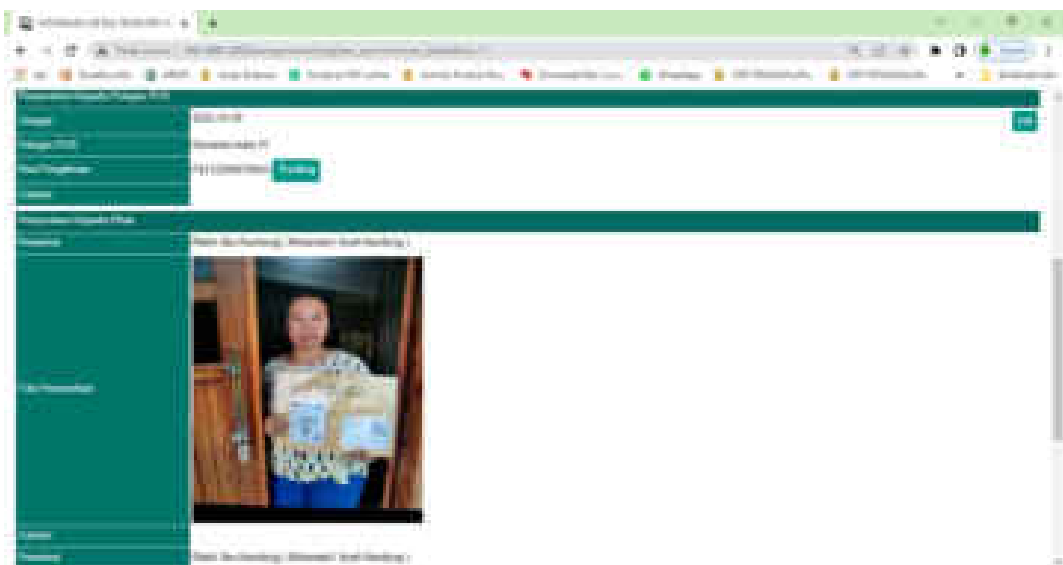
2. Pengiriman Produk Melalui Pos

Pengiriman produk melalui pos adalah inovasi baru yang diadakan di Pengadilan Agama Banjarnegara pada menjelang akhir tahun 2022.

Berdasarkan kerjasama dengan Kantor Pos Banjarnegara dengan nomor W11-A5/2519/HM.01.1/IX/2022 dan Nomor 228/BISKURLOG/PENJUALAN/IV/0922 tanggal 23 September 2022 tentang Pembukaan Loker Pos di Pengadilan Agama Banjarnegara, salah satu layanan tambahan yang diberikan adalah berupa pengiriman produk melalui pos.

Pihak berperkara yang telah selesai sidang, akan diberitahukan oleh Kasir saat pengembalian sisa panjar apakah produk berupa Akta Cerai maupun Salinan Putusan/Penetapan akan diambil di kantor pengadilan atau dikirim melalui pos. Apabila ingin dikirim melalui pos akan diarahkan ke petugas pelayanan untuk diregistrasi. Biaya tambahan selain PNPB yang dikenakan hanyalah biaya kirim yang sesuai perjanjian dengan pos disamakan Rp.10.000 untuk seluruh wilayah di Kabupaten Banjarnegara dan dibayarkan dengan sistem COD (*Cash on Delivery*) kepada petugas pos yang mengantar.

Inovasi yang mulai dijalankan per tanggal 30 November 2022 ini, sampai dengan laporan ini dibuat telah digunakan oleh 25 orang pemohon pengambilan produk dengan status bervariasi dari yang masih dalam proses, sudah ada pada petugas pos, maupun sudah diterima. Setiap penerima produk di rumah didokumentasikan berupa foto oleh petugas pos sehingga petugas pengadilan mempunyai arsip siapa yang bertanggung jawab menerima dokumen tersebut.



BAB VI

PENGAWASAN

A. Pengawasan Internal

Pengawasan internal merupakan sebuah proses, yang diwujudkan oleh pimpinan organisasi maupun anggotanya, yang dirancang untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi berupa pencapaian efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasional, keandalan pelaporan keuangan serta ketaatan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku

Sistem pengawasan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal dan dilaksanakan secara terprogram dan terkoordinasi untuk memperoleh hasil yang optimal. Pengawasan mempunyai fungsi monitoring dan pengendali pelaksana program kerja suatu unit kerja atau lembaga untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan sekaligus mengarahkan tercapainya tujuan program kerja, adapun Pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku (KMA/080/SK/VIII/ 2006 tanggal 24 Agustus 2006).

Pengawasan melekat yang telah memiliki norma – norma baku sesuai struktur dan hierarki organisasi. Secara normatif aturan pengawasan di Pengadilan Agama Banjarnegara mengacu pada Pasal 53 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sebagaimana telah diuraikan dalam pasal tersebut, pengawasan melekat adalah merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya sesuai dengan struktur yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Banjarnegara pengawasan melekat dipisahkan pembagian tugas pengawasan melekat oleh Ketua dan Wakil Ketua yang bersifat umum, dimana termasuk didalamnya pengawasan terhadap para Hakim dan pengawasan melekat secara struktural yang berpuncak pada Panitera sebagai atasan langsung dari para Panitera Muda, yaitu Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum, demikian juga Sekretaris sebagai atasan langsung dari para Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Panitera disamping mempunyai tugas pengawasan secara struktural kepada Panitera Muda juga mempunyai tugas pengawasan terhadap pejabat fungsional yaitu para Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti.

2. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut. Pengawasan ini meliputi seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang mencakup bidang administrasi perkara maupun administrasi umum. Dalam pelaksanaannya pengawasan ini mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988 yang mengatur tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua. Dalam Surat Edaran tersebut ditegaskan bahwa tugas pengawasan Ketua didelegasikan kepada Wakil Ketua.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan internal, telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Banjarnegara, melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor W11-A5/111/PS.01/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA.

Sehubungan dengan adanya mutasi dan promosi Hakim maka terdapat beberapa kali pergantian posisi hakim pengawas bidang. Susunan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Banjarnegara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor W11-A5/2636/PS.01/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Dalam Pengawasan
1.	Siti Fadiah, S.Ag., M.H. NIP. 19710712.199203.2.002	Koordinator Pengawas, Pengawas Bidang Administrasi Perkara
2.	Drs. H. Ihsan, M.H. NIP.19660529.199402.1.001	Pengawas Bidang Management Peradilan
3.	Drs. Mahli, S.H. NIP.19581005.198303.1.007	Pengawas Bidang Administrasi Persidangan
4.	Drs. H. Sasmiruddin, M.H. NIP. 19621010.199203.1.008	Pengawas Bidang Pelayanan Publik
5.	Drs. Nangim, M.H NIP.19590716.198703.1.002	Pengawas Bidang Administrasi Umum

B. Evaluasi

Dalam rangka pengawasan terhadap hasil kerja yang telah dicapai oleh masing-masing bagian dalam melaksanakan tugasnya, unsur pimpinan dari masing-masing struktur telah melakukan pengawasan langsung pada bagiannya masing-masing, kemudian dari pengawasan yang dilaksanakan selama tahun 2022 tersebut oleh pimpinan pengadilan antara lain Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris akan dibawa ke dalam rapat berkala untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas termasuk hasil pengawasan dari semua bagian sehingga dengan demikian terjadi sinergi antar bagian yang ada.

Hakim Pengawas bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara telah melakukan pemeriksaan secara komprehensif tentang tugas pokok di lingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut :

- Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui aplikasi Kinsatker.
- Setelah melakukan pemeriksaan masing-masing Hakim Pengawas Bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.

- Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara untuk di evaluasi.
- Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan Hakim Pengawas Bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada masing-masing atasan langsung pejabat atau petugas yang melaksanakan pekerjaan itu agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dengan skala prioritas.
- Temuan-temuan yang tidak dapat segera diatasi dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Banjarnegara dalam hal memberikan pelayanan publik telah mengoptimalkan penggunaan sistem teknologi informasi melalui SIPP dan berbagai macam aplikasi lainnya maupun pelayanan dalam bentuk konvensional merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran Pengadilan Agama Banjarnegara, meskipun tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal.

Dalam rangka mewujudkan instansi yang bersih dan berwibawa dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Banjarnegara dari tahun ke tahun senantiasa melakukan pembenahan di segala bidang baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan. Pembenahan tersebut dilakukan dengan cara penertiban administrasi Kepaniteraan dan administrasi Kesekretariatan yang sesuai dengan standar administrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan untuk efisiensi dan efektifitas pekerjaan.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari tujuan tersebut, maka dilakukan juga pengawasan terhadap jalannya administrasi di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara. Tujuan dari pengawasan tersebut yaitu agar langkah-langkah perbaikan senantiasa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu menjadikan Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai salah satu instansi yang bersih berwibawa, dan dapat memberikan pelayanan primat erhadap masyarakat pencari keadilan.

Semakin mengecilnya tingkat pengaduan masyarakat, mengecilnya perkara-perkara banding dan kasasi atas produk putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, menandai tingkat kepuasan/kepercayaan masyarakat pencari keadilan semakin tinggi. Hal tersebut berarti perubahan kinerja seluruh jajaran Pengadilan Agama Banjarnegara di tahun 2022 semakin baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Pelayanan kepada publik pencari keadilan sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011 telah dijalankan dengan tetap melakukan terobosan-

terobosan baru di bidang IT demi menunjang informasi pelayanan publik. Dan terhadap penanganan perkara di Pengadilan Agama Banjarnegara telah dilaksanakan dengan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) secara profesional dengan mengedepankan pelayanan prima.

Pengawasan di Pengadilan Agama Banjarnegara telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 145/KMA/VII/SK/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan dengan tetap mengedepankan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada masyarakat dengan melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja yang didasarkan atas profesionalisme, etika dan moral.

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Banjarnegara dalam hal memberikan pelayanan publik melalui sistem teknologi informasi, SIPP, reformasi birokrasi, dan pelayanan dalam bentuk manual merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran Pengadilan Agama Banjarnegara, sekalipun tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal.

1. Hambatan internal :

- Beban tugas yang cukup banyak sedangkan jumlah pegawai terbatas.
- Sarana dan prasarana masih kurang memadai, terutama rumah dinas dan kendaraan dinas serta perlunya peremajaan komputer.
- Dana pada DIPA belum memadai dan cenderung tidak banyak penambahan setiap tahunnya.
- Kemampuan sumber daya manusia yang ada terbatas.

2. Hambatan eksternal

- Belum tingginya kesadaran hukum sebagian masyarakat sehingga sering menghambat proses penyelesaian perkara.

B. Rekomendasi

1. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Perkara

- a. Perlu diupayakan kelengkapan unsur pimpinan karena posisi Wakil Ketua yang kembali kosong di akhir tahun 2022 dapat membuat fungsi kepemimpinan terhambat.

- b. Perlu dilakukan koordinasi dan pembinaan secara intensif kepada seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan semua Pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu mempertahankan penyelesaian perkara sampai lebih dari 90% perkara yang diterima pada tahun berjalan.
 - c. Perlu penambahan jumlah Jusrita dan Jusrita Pengganti, dimana dengan kondisi jumlah perkara sekitar 3500 per tahun, tenaga Jusrita/Jusrita Pengganti yang melaksanakan tugas pemanggilan hanya 4 orang saja yang mana 1 (satu) orang Jusrita mendapatkan promosi sebagai Kasubbag berdasarkan TPM tanggal 23 Desember 2022 dan 1 (satu) orang Jusrita Pengganti akan memasuki masa pensiun pada bulan April 2023.
 - d. Perlu adanya pelatihan bidang kearsipan perkara dan arsip dinamis karena pengelolaan arsip perkara cukup sering bermasalah.
 - e. Perlu adanya penambahan perangkat komputer untuk peningkatan akses pelayanan publik.
2. Bidang Administrasi Umum dan Manajemen
- a. Diperlukan adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dan strategi manajemen SDM dengan memperhatikan beban kerja, karena esensi tersebut seharusnya didasarkan atas prinsip-prinsip yang meliputi :
 - Dapat menarik sumber daya manusia yang berkualitas untuk bergabung dengan organisasi dan sekaligus mampu mempertahankan pekerja yang berkualitas yang sudah ada dalam organisasi.
 - Menyediakan reward terhadap pegawai yang berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi (*desired behaviour*), seperti prestasi kerja, patuh, disiplin, berpengalaman dan bertanggungjawab.
 - Dalam rangka mendapatkan tenaga yang profesional perlu adanya rekrutmen pegawai baru dan pelaksanaan rotasi, mutasi maupun promosi pegawai berbasis kompetensi.
 - b. Untuk mewujudkan profesionalisme PNS perlu dilakukan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan (Diklat/Bimtek) yang meliputi diklat teknis dan non teknis peradilan serta diklat keterampilan.

- c. Perlu adanya penambahan modal untuk merehab bangunan kantor (tata ruang) untuk menghindari adanya pertemuan antara pegawai dengan para pencari keadilan.
- d. Adanya pemberian *reward* dan promosi jabatan bagi hakim dan pegawai yang menunjukkan kinerja yang tinggi.
- e. Perlu adanya penambahan pegawai untuk pengelola perpustakaan dan arsip yang kompeten di bidangnya.
- f. Perlu adanya penambahan belanja modal untuk pengadaan kendaraan dinas roda 4 karena dari 3 (tiga) unit yang ada 1 (satu) unit dalam kondisi rusak

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I

SK Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan



Lampiran II

Matrik SOP (Standar Operasional Prosedur)

Prosedur Mutu Manajemen

No	Nama Prosedur Mutu
1.	Prosedur Mutu Manajemen Resiko
2.	Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen
3.	Prosedur Mutu Pengendalian Arsip
4.	Prosedur Mutu Komunikasi
5.	Prosedur Mutu Asesmen Internal
6.	Prosedur Mutu Tinjauan Manajemen
7.	Prosedur Mutu Pengendalian Output tidak Sesuai
8.	Prosedur Mutu Evaluasi Kepuasan Pelanggan
9.	Prosedur Mutu Tindakan Perbaikan
10.	Prosedur Mutu Pengendalian Peluang
11.	Prosedur Mutu Perubahan Perencanaan

Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan

No	Nama SOP
1.	SOP Penerimaan & Pendaftaran Perkara
2.	SOP Penerimaan & Pendaftaran Upaya Hukum
3.	SOP Penerimaan & Pendaftaran Eksekusi tanpa Putusan Pengadilan Agama dengan Cara Lelang
4.	SOP Penerimaan & Pendaftaran Konsinyasi
5.	SOP Pelayanan Permohonan Itsbat Rukyat Hilal
6.	SOP Penanganan Berkas Perkara
7.	SOP Persidangan
8.	SOP Pemanggilan Para Pihak
9.	SOP Proses Persidangan
10.	SOP Pelayanan Mediasi
11.	SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat
12.	SOP Pelayanan Permohonan Sita Jaminan
13.	SOP Penyelesaian Perkara
14.	SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil
15.	SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan
16.	SOP Pelayanan Ikrar Talak
17.	SOP Penyerahan Produk
18.	SOP Pelayanan Pengiriman Petikan Salinan Putusan ke KUA dan Dindukcapil
19.	SOP Pelaporan Perkara
20.	SOP Pengarsipan Berkas Perkara
21.	SOP Pelayanan Informasi Berbasis TI
22.	SOP Pelayanan Pos Bantuan Hukum
23.	SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat
24.	SOP Pengelolaan ATK Perkara
25.	SOP Pelayanan Pengelolaan Keuangan Perkara
26.	SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah

Standar Operasional Prosedur Kesekretariatan

No	Nama SOP
1.	SOP Pelaksanaan Orientasi & Sosialisasi Penyampaian Peran Tanggung Jawab
2.	SOP Pengembangan Pegawai
3.	SOP Penyusunan Rencana Program & Anggaran
4.	SOP Izin Belajar & Tugas Pegawai
5.	SOP Pengelolaan Data Pegawai
6.	SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Kartu Pensiun, Kartu BPJS dan Karis/Karsu
7.	SOP Pelaksanaan Penegakkan Disiplin
8.	SOP Pengelolaan Cuti Pegawai
9.	SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat
10.	SOP Kenaikan Gaji Berkala
11.	SOP Pengelolaan Izin Perkawinan & Perceraian bagi Pegawai
12.	SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai
13.	SOP Pemberian Nilai kepada Pegawai dan Pendelegasian Wewenang
14.	SOP Pemberian Penghargaan pada Pegawai
15.	SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas
16.	SOP Penatausahaan Aset
17.	SOP Penatausahaan Persediaan
18.	SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan
19.	SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan
20.	SOP Pengelolaan Perpustakaan
21.	SOP Pencairan Anggaran
22.	SOP Penatausahaan PNBK
23.	SOP Pengelolaan Teknologi Informasi
24.	SOP Pengadaan Barang dan Jasa
25.	SOP Pelaporan Harta Pegawai dan Penyelenggara Negara
26.	SOP Penyusunan Laporan Keuangan
27.	SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
28.	SOP Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas dan Laporan Tahunan
29.	SOP Pengajuan Revisi DIPA
30.	SOP Pengarsipan Naskah Dinas
31.	SOP Pertanggungjawaban Anggaran



Lampiran III
Dokumentasi Kegiatan



Penandatanganan MOU Pengadaan Pos Bantuan Hukum Tahun 2022 (12/01/2022)



Pemberian Penghargaan Triwulan I di PTA Semarang (17 Maret 2022)



Halal Bihalal Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2022 (15/05/2022)



Rapat Pembahasan Akreditasi Penjaminan Mutu (29/06/2022)



Penerimaan Mahasiswa PPL IAIN Salatiga (13/07/2022)



Pelantikan PNS Pengadilan Agama Banjarnegara (26/07/2022)



Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 (17/08/2022)



Upacara Peringatan HUT Mahkamah Agung Republik Indonesia (19/08/2022)



Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Mengikuti Gelar Aparatur Kabupaten Banjarnegara
(23/08/2022)



Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Kantor Pos Banjarnegara (23/09/2022)



Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara (06/09/2022)



Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Ikuti Pembukaan TMMD Sengkuyung (11/10/2022)



Evaluasi Pos Bantuan Hukum (18/10/2022)



Waka Pengadilan Agama Banjarnegara Menghadiri Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Pendopo Dipayuda Adigraha Banjarnegara (01/12/2022)



Penandatanganan Kerjasama dengan Pemkab Banjarnegara (14/12/2022)



Penandatanganan Kerjasama dengan Polres Banjarnegara (28/12/2022)



Dokumentasi Pengajian Selama Bulan Ramadhan Tahun 2022



Dokumentasi Apel Pagi



Dokumentasi Apel Sore